

SKRIPSI

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BELANJA DAERAH, TINGKAT KEMISKINAN DAN KEMASLAHATAN EKONOMI (DATA PANEL KABUPATEN/KOTA DI ACEH)



Disusun Oleh:

**NADIA ULFAH
NIM. 190602165**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadia Ulfah
NIM : 190602165
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nadia Ulfah

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

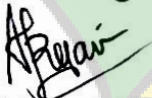
Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)”

Disusun Oleh:

Nadia Ulfah
NIM. 190602165

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Puji Ariani, Ph.D
NIDN. 1313036901

Pembimbing II



Junia Farma, M.Ag
NIP.199206142019032039

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)

Nadia Ulfah
NIM. 190602165

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Srata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijjah 1442 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Puji Ariani, Ph.D
NIDN. 1313036901

Sekretaris



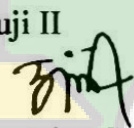
Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Penguji I



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II



Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fadd, M.Ag
NIP. 1992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nadia Ulfah
NIM : 190602165
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602165@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi yang berjudul :

“Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)”

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Juli 2021

Mengetahui

Penulis

Nadia Ulfah

Pembimbing I

Puji Ariani, Ph.D
NIDN. 1313036901

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

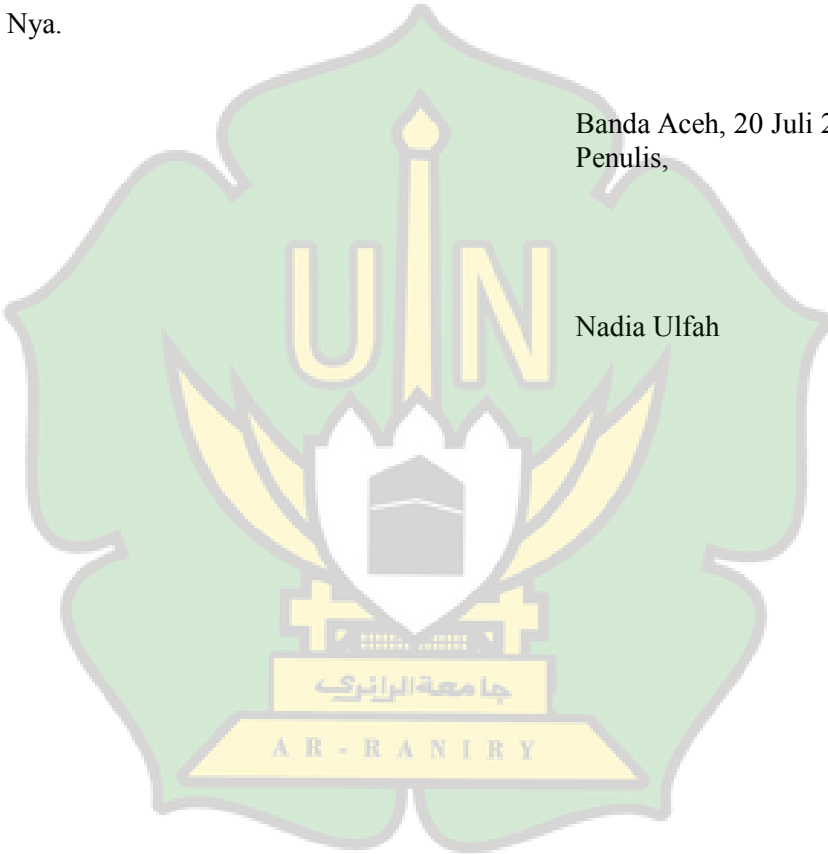
Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan isi skripsi ini untuk masa yang akan datang. Skripsi ini juga tidak terlepas dari partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan sumbangan ide, waktu, tenaga, serta bantuan batin maupun materiil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Puji Ariani, Ph.D selaku pembimbing I dan Junia Farma, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku penguji I dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Fithriady, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA) dan para dosen Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh Staff di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Syukri, Ibunda Rismida, dan keluarga besar yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman pada Program Studi Ekonomi Syariah serta teman-teman lainnya yang memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi semua pihak untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan segala nikmat-Nya.

Banda Aceh, 20 Juli 2021
Penulis,

Nadia Ulfah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nadia Ulfah
NIM : 190602165
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi (Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)
Pembimbing I : Puji Ariani, Ph.D
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data panel dari 23 kabupaten/kota di Aceh selama periode tahun 2014-2019. Analisis data yang digunakan adalah *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM) dan *panel granger causality test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar variabel yaitu variabel yang memiliki hubungan jangka panjang ialah belanja daerah, kemiskinan, dan IPM. Sedangkan dalam hubungan jangka pendek PAD tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, namun PAD berpengaruh terhadap belanja daerah dan secara negatif berpengaruh terhadap IPM, kemudian belanja daerah tidak dipengaruhi oleh kemiskinan, namun belanja daerah secara positif mempengaruhi IPM sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Hasil *Panel Granger causality test* mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kausalitas antara belanja daerah dan IPM terhadap PAD sedangkan kemiskinan terdapat hubungan satu arah terhadap PAD. Kemudian juga terdapat hubungan satu arah antara belanja daerah dan kemiskinan terhadap IPM, namun kemiskinan dan IPM tidak terdapat hubungan diantara keduanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRISI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.6 Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.2 Belanja Daerah	17
2.3 Kemiskinan.....	21
2.4 Kemaslahatan Ekonomi	24
2.5 Keterkaitan Antar Variabel.....	30
2.5.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah.....	30
2.5.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kemiskinan	31
2.5.3 Hubungan Belanja Daerah dengan Kemiskinan	32
2.5.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kemaslahatan Ekonomi (Indeks Pembangunan	

Manusia	33
2.5.5 Hubungan Belanja Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia	34
2.5.6 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia	35
2.6 Penelitian Terkait.....	37
2.7 Kerangka Pemikiran	42
2.8 Hipotesis Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.3 Operasional Variabel	45
3.4 Metode Analisis Data	47
3.4.1 Uji Stasioneritas Data.....	49
3.4.2 Penentuan Panjang Lag Optimum.....	49
3.4.3 Uji Stabilitas.....	50
3.4.4 Uji Kointegrasi	51
3.4.5 Estimasi PVAR/PVECM	51
3.4.6 Uji Kausalitas	53
3.4.7 Impulse Response Function	53
3.4.8 Variance Decompositions	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Statistik Deskriptif.....	54
4.2 Analisis VECM	54
4.3 Pembahasan	55
4.1.1 Uji Stasioneritas Data.....	55
4.1.2 Penentuan Panjang Lag Optimum.....	56
4.1.3 Uji Kointegrasi Metode Johansen Fisher	57
4.1.4 Uji Stabilitas Vector Autoregression	59
4.1.5 Uji Panel Vector Error Correction Model	60
4.1.6 Hasil <i>Impulse Response Function</i> (IRF)	67
4.1.7 Hasil <i>Variance Decomposition</i> (VD).....	70
4.1.8 Uji Kausalitas Granger.....	74

BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian terkait.....	39
Tabel 4.1	Hasil Uji Stasioneritas Data Metode Philips-Perron Test	55
Tabel 4.2	Hasil Uji Lag Optimal	57
Tabel 4.3	Hasil Uji Kointegrasi Johansen Panel Cointegration.....	58
Tabel 4.4	Hasil Uji Stabilitas	59
Tabel 4.5	Hubungan Jangka Panjang	60
Tabel 4.6	Hubungan Jangka Pendek	61
Tabel 4.7	Varian Dekomposisi PAD	71
Tabel 4.8	Varian Dekomposisi BD	71
Tabel 4.9	Varian Dekomposisi KMS	72
Tabel 4.10	Varian Dekomposisi IPM.....	73
Tabel 4.11	Hasil Uji Kausalitas dengan menggunakan Granger Causality Test.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Kerangka Pemikiran	42
Gambar	3.1	Tahapan Analisis Data	48
Gambar	4.1	Respon Masing-Masing Variabel	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Panel	86
Lampiran 2	Hasil Output Eviews	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka timbul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus sendiri daerahnya. Adanya desentralisasi akan berdampak baik pada pembangunan daerah di suatu negara, sehingga daerah otonom tersebut menjadi mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Begitu pula dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat dengan leluasa memperdayakan daerah dan mengelola sumber daya potensialnya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kewajiban setiap pemerintah. Komitmen dan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pada dasarnya dapat diukur melalui capaian pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Wahyudi et al., 2014). Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab

untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai apabila kegiatan ekonomi terus tumbuh dan berkembang, dimana strategi yang dilakukan untuk memicu kegiatan ekonomi tersebut ialah dengan belanja daerah yang dikelola dengan sebaik mungkin. Kemudian peranan pemerintah didalam kegiatan ekonomi juga tercermin pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, seperti yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Anggaran pendapatan tersebut harus dapat dialokasikan pada kegiatan yang produktif dan hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan pula.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh wilayah itu sendiri, melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri dan diatur berdasarkan peraturan daerah. Menurut Halim (2004), “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa “pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pada dasarnya, pendapatan asli daerah di setiap daerah itu berbeda-beda, tergantung bagaimana kemampuan daerah tersebut dalam menggali sumber pendapatan dan mengolah sumber daya yang ada sehingga nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah di Aceh umumnya setiap tahun mengalami kenaikan, yang mana tujuannya ialah agar dana tersebut dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin. Realisasi pendapatan asli daerah tersebut pada tahun 2019 ialah sebesar 2,54 triliun rupiah, dan pada tahun 2020 ialah sebesar 2,57 triliun rupiah, dimana realisasi pendapatan asli daerah itu sendiri mengalami kenaikan sebesar 0,03% (BPS Aceh, 2020). Namun angka tersebut masih tergolong rendah, artinya pemerintah provinsi Aceh masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Maka diharapkan kedepannya pemerintah Aceh untuk dapat mengerahkan segala sumber daya yang ada dan melakukan strategi pembangunan yang tepat agar kemandirian daerah dengan perlahan dapat terwujud.

Realisasi belanja daerah provinsi Aceh sepanjang tahun 2019-2020 mencapai 13,24 sampai 15,58 triliun rupiah. Pendapatan pemerintah kabupaten/kota sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, dengan kontribusi sebesar 55–63% per tahun. Pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dananya masih sangat minim hanya 8-11%. Sedangkan belanja daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh

paling banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dengan kontribusi sebesar 34–40% setiap tahunnya (BPS Aceh, 2020). Belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja tidak langsung digunakan untuk membayar gaji aparatur daerah sedangkan belanja langsung selama dua tahun terakhir ini lebih diutamakan digunakan untuk belanja modal disebabkan lebih efektif digunakan untuk belanja modal, sedangkan jika digunakan untuk belanja barang dan jasa masih kurang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Aceh. Secara keseluruhan baik belanja langsung maupun tidak langsung lebih dominan digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa untuk belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada kegiatan-kegiatan pembangunan.

Walaupun pemerintah daerah telah mengupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengupayakan pengelolaan pendapatan daerah dengan sebaik mungkin untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun kenyataannya Aceh masih dihadapkan pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data badan pusat statistik Aceh tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 814 ribu jiwa (14,99%). Bahkan sebelumnya sejumlah penelitian mencatat bahwa daerah ini tidak hanya dihadapkan pada persoalan mengenai kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan ketimpangan pendapatan di masyarakat (Amri, 2017).

Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didalam suatu daerah merupakan cita-cita bangsa. Karena apabila di suatu daerah tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatannya tinggi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut terhambat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk terus melakukan upaya-upaya yang dapat meminimalisasi hal tersebut baik itu melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang tepat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan atau kemaslahatan ekonomi diantara masyarakat.

Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi ialah segala aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar masalah yang akan mendatangkan manfaat dan berkah guna memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Kesejahteraan tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non-material. Salah satu kebutuhan non-material yang paling penting adalah keadilan. Karena kesejahteraan yang hakiki mustahil akan pernah terealisasi tanpa adanya keadilan. Jika keadilan dapat ditegakkan maka dengan sendirinya akan menciptakan kesejahteraan. Karena kesejahteraan yang dibangun dengan dasar tauhid memiliki penekanan pada dua kehidupan yakni kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, akses di media masa, dan indeks pembangunan manusia. Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari indeks pembangunan manusia, yaitu indeks yang mengukur persentase pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Mubarrizi, 2021).

Badan Pusat Statistik mencatat indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2020 berada di angka 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin), dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 71,92. Meningkatkan IPM disebabkan oleh peningkatan pada tiga komponen pembentuk indeks, yaitu indikator umur harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat, rata-rata lama sekolah, dan tingkat standar hidup layak atau pendapatan per kapita. Dengan capaian ini, IPM Aceh disebut berada pada status tinggi nasional. Jika dilihat berdasarkan angka indeks tertinggi, Aceh berhasil mengungguli 23 provinsi lainnya di Indonesia dan hanya 10 provinsi yang indeksnya berada di atas Aceh, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Ramadhan (2020) menyimpulkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dapat mempengaruhi kemiskinan pada pemerintah dan kota di Sumatera Utara, maka dari itu untuk pemerintah daerah seharusnya lebih teliti dalam hal menggunakan anggaran belanja daerah dengan cara mengeluarkan anggaran belanja daerah hanya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan adanya belanja daerah yang tidak terlalu penting dapat menambah tingkat kesulitan bagi masyarakat. Begitu juga dengan pendapatan daerah harus bisa digunakan untuk hal-hal yang khususnya dapat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi hal ini bisa terjadi jika taraf hidup masyarakat di suatu daerah sudah tercukupi maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dikatakan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melihat hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi. Adapun urgensi dari penelitian ini ialah fokus peneliti ingin meninjau sejauh mana pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kemiskinan ini dapat meningkatkan kemaslahatan ekonomi serta variabel lainnya jika ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja**

**Daerah, Tingkat Kemiskinan dan Kemaslahatan Ekonomi
(Data Panel Kabupaten/Kota di Aceh)”.**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi.
2. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh beberapa manfaat penelitian, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi guna menambah pengetahuan bagi para akademisi dan ilmu pengetahuan yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan variabel-variabel lain untuk melihat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi kepada para pengambil kebijakan pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah serta instansi terkait dalam menentukan langkah-langkah kebijakan dan pengelolaan anggaran yang tepat agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan kemaslahatan ekonomi.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2014-2019 yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dengan menggunakan metode *Panel Vector Error Correction Model*. Penelitian ini juga membahas teori-teori dalam perspektif ekonomi Islam mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, kemiskinan, dan kemaslahatan ekonomi.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas enam subbab, pertama latar belakang yang memaparkan isu dan fenomena terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kedua, rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan dicarikan penyelesaiannya dalam penelitian ini. Ketiga dan keempat, terdiri dari tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kelima, ruang lingkup yang membahas batasan penelitian. Selanjutnya yang keenam, sistematika pembahasan yang

menjelaskan arah dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka dan hasil-hasil dari penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna mengetahui posisi penelitian dan juga pendapat para ahli yang pernah melakukan penelitian yang serupa serta memuat kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga mendeskripsikan tentang operasional penelitian yang menguraikan variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memuat penjelasan secara singkat tentang gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi. Selanjutnya memuat tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari pengolahan data, yang akan menjawab jawaban dari rumusan masalah di bab I.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian yang sekaligus merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya juga ada saran serta masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini agar dapat menentukan kebijakan dalam perekonomian Aceh dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 mengatakan “Pendapatan Asli Daerah” atau disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas beberapa bagian, diantaranya:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa iuran dilakukan oleh pribadi/perorangan atau badan terhadap daerah tanpa imbalan yang langsung dan seimbang serta dapat dipaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, setelah itu akan digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/perorangan atau badan.

3. Hasil-Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

UU No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yaitu mencakup bagian laba atas penyertaan modal atau investasi kepada pihak ketiga pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik negara/BUMN, dan pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam hal ini, pendapatan daerah yang sah dalam pembiayaan belanja dari suatu daerah menggunakan cara-cara yang umum dan tidak menyalahkan peraturan yang telah berlaku. Pilihan agar mendapatkan perolehan ini dapat dilaksanakan dengan cara meminjamkan ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah lain, kemudian ke lembaga keuangan maupun non-keuangan, terhadap rakyat, dan penerbitan surat hutang daerah (Nurzen & Riharjo, 2016).

Setiap daerah memiliki sumber-sumber pendapatan yang potensial, maka diberikan peluang untuk berusaha menggali hal tersebut. Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun dan menyediakan dana sebesar-besarnya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah (Mariyanto, 2015).

Pendapatan asli daerah tersebut merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berdasarkan potensi masing-masing daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan dan mendorong kemampuan penerimaannya ialah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Nursali, 2017).

Dasar hukum dalam kebijakan pendapatan asli daerah sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun dasar hukum Islamnya ialah seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 29:

فُتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهُمْ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
صُعُورًا

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk” (Q.S. At-taubah [9]: 29).

Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam ialah pada masa penguasa muslim dimana pajak diwajibkan karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut. Dalam kondisi demikian, para ulama memperbolehkan untuk menetapkan pajak dengan tujuan kemashlahatan umat, karena apabila dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai

berbagai pengeluaran-pengeluaran maka akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.

2.2 Belanja Daerah

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang belanja daerah, belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Adapun klasifikasi belanja menurut ekonomi yaitu:
 - 1) Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
 - 2) Belanja modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud.
 - 3) Belanja lain-lain/tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang meliputi: penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

- 4) Transfer, adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- b. Klasifikasi menurut organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas pemerintah, dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.
- c. Klasifikasi menurut fungsi, adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi: belanja pelayanan umum, belanja pertahanan, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja perlindungan lingkungan hidup, belanja perumahan dan pemukiman, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di suatu daerah. Pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah sebaiknya melakukan identifikasi untuk memilih skala prioritas dalam menentukan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Belanja daerah memuat semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Pengeluaran kas daerah tersebut harus

disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri (Wati & Fajar, 2017).

Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat agar tujuan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pemerintah tersebut ialah untuk menyejahterakan masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Jika pemerintah menentukan pengeluaran untuk belanja daerah yang tidak tepat maka pengeluaran tersebut akan menjadi tidak produktif dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah, sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan.

Agama Islam mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsep tanggung jawab, mulai dari tanggung jawab manusia terhadap sang khalik, tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat dan juga tanggung jawab terhadap negara. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mudatsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”* (Q.S. Al-Mudatsir [74]: 38).

Selain itu, Islam juga mengajarkan kita untuk bersikap amanah. Orang yang bersikap tidak amanah akan mendapat sanksi dari Allah maupun masyarakat. Begitu juga dengan pengelolaan keuangan, maka sebagai pengelola keuangan ataupun pemerintah

harus memiliki sifat amanah dalam mengelola keuangan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*” (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

Ayat tersebut menjelaskan tentang amanah yang diterima oleh para penguasa (pejabat) dalam menetapkan kebijakan untuk hajat orang banyak haruslah bersikap adil dan memberikan amanat kepada yang benar menerima haknya, yaitu dengan cara yang jujur, transparan, dan tidak ada yang dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Maka para pemegang kekuasaan diperintahkan untuk menjaga amanah yang sudah diberikan pada dirinya, yaitu yang berkaitan dengan rakyatnya ataupun bawahannya dan pemimpin harus berbuat adil dalam memberikan keputusan-keputusan.

Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang diberikan amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Sesungguhnya, keseluruhan harta secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan

atau kemaslahatan masyarakat (Lubis, 2012).

2.3 Kemiskinan

Kemiskinan menurut *World Bank* (2006) merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang layak sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya, standar rasio kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* adalah 2\$/day (dua dollar per hari) artinya seorang individu atau kelompok yang memiliki pendapatan kurang dari dua dollar dikatakan miskin.

Kemiskinan seringkali disebabkan dengan tingginya jumlah pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha, tidak memiliki pengetahuan yang luas, jenjang pendidikan yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi.

Menurut Chambers dalam Suryawati (2005), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, yaitu pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup berkelanjutan.

2. Kemiskinan Relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan Struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi menyebabkan suburnya kemiskinan.

Allah SWT sudah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat QS. Al-Israa' Ayat 30. Allah mengajarkan muslim agar tetap optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT. Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Al-Qur'an tentang kondisi

kemiskinan, dimana ada orang yang diberikan rezeki lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin).

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Israa' Ayat 30:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan-Nya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”* (Q.S. Al-Israa' [17]: 30).

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan perolehan harta yang berbeda antar manusia. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara yang kaya dengan miskin, atau lapang dengan sempit, adanya batasan antara sikaya dengan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika dilihat dari pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja, memiliki *skill* atau keterampilan sesuai dengan pekerjaan, mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti yang seperti inilah yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah SWT (Tama, 2019).

Penyebab kemiskinan dalam perspektif Islam ialah karena perbedaan pendapatan. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikan. Oleh karena itu, Islam tidak berbicara mengenai upaya untuk menghilangkan kemiskinan, namun berbicara mereduksi dan

meminimalisasi kemiskinan agar tercapai kehidupan yang sejahtera. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling menolong, saling bersilaturahmi dan saling bersinergi (Beik, 2016).

2.4 Kemaslahatan Ekonomi

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan (kemaslahatan) dalam kehidupannya, dan setiap manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi ialah segala aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar masalah yang akan mendatangkan manfaat dan berkah guna memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan, dan kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan terhadap kebutuhan merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan tersebut adalah kewajiban agama.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta

bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT.

Terkait dengan konsep kesejahteraan, Ibnu Khaldun menggagas kesejahteraan tidak saja untuk pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non-material. Salah satu kebutuhan non-material yang paling penting adalah keadilan. Karena kesejahteraan yang hakiki mustahil akan pernah terealisasi tanpa adanya keadilan. Di dalam Al-Qur'an juga telah ditegaskan bahwa penegakan keadilan itu ialah dasar tujuan diutusnya para rasul, seperti yang difirmakan Allah dalam surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: *“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil”* (Q.S. Al-Hadid [57]: 25).

Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “ketidakadilan sebagai kegelapan yang sesungguhnya”.¹ Hal demikian dikarenakan ketidakadilan dapat meruntuhkan solidaritas, karena ketidakadilan akan sangat mudah menimbulkan konflik, dan ketidakadilan dapat juga menghilangkan rasa saling percaya serta dapat menyebabkan kerusakan sendi-sendi kehidupan manusia.

Terkait dengan pentingnya penegakan sebuah keadilan, Abu Yusuf pernah menegaskan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid

bahwa penegakan keadilan dan pembasmian ketidakadilan akan mempercepat pembangunan. Begitu pula dengan Al-Mawardi, beliau menyatakan bahwa keadilan akan meningkatkan solidaritas, penegakan hukum, pembangunan negara, peningkatan kekayaan, pertumbuhan penduduk dan keamanan negara. Dinyatakan pula “tidak ada yang dapat merusak dunia dan kemanusiaan manusia lebih cepat dari ketidakadilan”. Tidak hanya itu, Ibnu Taimiyyah menyatakan keadilan adalah produk inti dari ketauhidan. Bahkan, Ibnu Khaldun sendiri menyatakan tidak mungkin membangun tanpa keadilan, ketidakadilan membawa kehancuran pembangunan, dan penurunan kesejahteraan adalah hasil dari pelanggaran keadilan (Sakirman, 2016).

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah adalah membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (Takhim, 2016).

Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya

untuk berusaha. Jika keadilan dapat ditegakkan maka dengan sendirinya akan menciptakan kesejahteraan. Karena kesejahteraan yang dibangun dengan dasar tauhid memiliki penekanan pada dua kehidupan yakni kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Islam memandang bahwa kehidupan di dunia sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya agar kesejahteraan tersebut dapat dirasakan sampai dengan kehidupan selanjutnya.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diukur dengan perhitungan fisik dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari indeks pembangunan manusia, yaitu indeks yang mengukur persentase pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Mubarrizi, 2021).

Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yakni kesehatan (angka harapan hidup ketika lahir), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf

penduduk usia 15 tahun ke atas) dan standar hidup layak (pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli) (Palayukan, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar manusia, yaitu $IPM = 1/3$ (indeks harapan hidup) + $1/3$ (indeks pendidikan) + $1/3$ (indeks daya beli) (Beik, 2016).

Skor indeks pembangunan manusia ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara, demikian pula sebaliknya. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengelompokkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) *Very high HDI*: untuk nilai $IPM \geq 0.800$
- 2) *High HDI*: $0.700 \leq \text{nilai IPM} < 0.800$
- 3) *Medium HDI*: $0.550 \leq \text{nilai IPM} < 0.700$
- 4) *Low HDI*: nilai $IPM < 0.550$

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antar wilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien

berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah (BPS, 2018).

Otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang lebih berkualitas ke kota. Sebagai dampaknya, daerah-daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah. Melalui otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah mampu mengembangkan program-program yang spesifik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah sehingga kualitas pembangunan manusianya dapat ditingkatkan berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah (BPS, 2018).

Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah (BPS, 2018).

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan, dan kemaslahatan ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun keterkaitan masing-masing variabel ialah sebagai berikut :

2.5.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar dari sumber daya alamnya serta ditunjang dengan sarana maupun prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat (Devita et al., 2014).

Kaitan pendapatan asli daerah dengan belanja pemerintah dapat melahirkan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. Iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya merupakan beberapa sumber-sumber

pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat berupa memberikan pelayanan publik yang bagus terhadap masyarakat dengan menggunakan anggaran belanja daerah, maka dari itu masyarakat juga memiliki tanggung jawab dengan menyumbangkan kemampuannya kepada pemerintah daerah seperti pajak. Kemudian pemerintah juga akan melayani rakyat setempat dengan memberikan fasilitas yang memadai baik itu fasilitas langsung maupun tidak langsung di daerahnya seperti pengadaan infrastruktur yang dibiayai dari bagian anggaran belanja daerah dalam APBD tiap tahunnya. Dari hal tersebut terdapat kaitan pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran provinsi. Namun tidak semua daerah yang memiliki pendapatan cukup baik akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik (Susanti & Fahlevi, 2016).

2.5.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah. Kemampuan daerah yang mampu mengoptimalkan dan mengelola pendapatannya sendiri akan mampu meningkatkan berbagai potensi di sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini dapat menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah itu sendiri (Setiyawati & Hamzah, 2007).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dari pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka

dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah secara otomatis akan bertambah, sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut (Idarwati et al., 2017). Dengan adanya pengelolaan secara mandiri oleh pemerintah daerah maka hal ini dapat mengatasi tingkat kemiskinan di daerah Aceh.

Tinggi rendahnya kemiskinan disuatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Jelas bahwa setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai suatu negara, selama distribusi pendapatan yang tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Ariyati, 2018).

2.5.3 Hubungan Belanja Daerah dengan Kemiskinan

Upaya dalam menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan ini dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi masalah kemiskinan ini sudah menjadi masalah sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat maka dari itu dibutuhkan berbagai strategi dari semua pihak yang terkait. Mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi dibutuhkan strategi pembangunan efektif dan efisien yang mengacu pada karakteristik

pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah, bagaimana mengelola potensi sumber daya dalam bentuk pendapatan daerah ke dalam bentuk belanja pemerintah dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat (Wahyudi et al., 2014).

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun, namun jumlah penduduk miskin di Aceh tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Dibanyak negara syarat utama bagi terwujudnya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pendapatan dari realisasi belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja daerah ini menjadi salah satu tolak ukur penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh karena belanja daerah ini dapat membantu perekonomian dan pembangunan di suatu daerah (Siregar & Ramadhan, 2020).

2.5.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kemaslahatan Ekonomi (Indeks Pembangunan Manusia)

Pendapatan Asli daerah digunakan oleh pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya. Tingkat kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Tujuan utama pembangunan daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

lebih baik melalui pembangunan manusia yang diukur melalui IPM. PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan IPM. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Hobrouw et al., 2021).

Untuk meningkatkan kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah diperlukan pengalokasian dan belanja yang besar pula, seperti belanja modal yang lebih besar guna pembangunan gedung, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga peningkatan sarana dan prasarana publik serta investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya akan meningkatkan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5.5 Hubungan Belanja Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Keterkaitan antara belanja daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran,

keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. (Mirza, 2021).

Alokasi anggaran pendidikan yang memadai dapat menunjang penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan program-program pendidikan baik yang berasal dari program pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia. Kemudian alokasi anggaran kesehatan yang memadai dapat dipergunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan terutama kesehatan dasar, serta pelaksanaan program-program kesehatan baik yang berasal dari program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia (Palayukan, 2019).

2.5.6 Hubungan Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan berpengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks pembangunan manusia memiliki indikator komposit yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Peningkatan kualitas tersebut dapat dipenuhi dengan

berbagai kebijakan, yaitu dengan pembangunan dibidang pendidikan maupun kesehatan. Karena apabila tingkat kesehatan dan pendidikannya mencukupi maka akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga dan akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Pada kenyataannya, dengan memperhatikan kualitas kesehatan maupun pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas SDM yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga dan akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Dewi, 2007). Sehingga peningkatan pada indikator kesehatan dan pendidikan serta

pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, kemiskinan, dan kemaslahatan ekonomi yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Namun masih banyak dari temuan yang mereka lakukan belum memberikan kesimpulan yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Ramadhan (2020) menunjukkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang diakibatkan oleh tata kelola pendapatan suatu daerah itu yang mungkin belum tepat sasaran sehingga PAD tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Frans et al (2017) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan,

Penelitian yang dilakukan oleh Joalinis (2014) menunjukkan bahwa (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh terhadap belanja daerah. Peningkatan jumlah PAD akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah belanja daerah yang

akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarrizi (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini dapat saja terjadi karena dengan kemandirian ekonomi manusia atau masyarakat yang sudah mencukupi kebutuhannya baik pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Hasil kajian sejumlah peneliti mengenai hubungan belanja daerah terhadap kemiskinan juga masih belum memberikan kesimpulan yang sama. Lantu et al. (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah baik melalui alokasi belanja langsung maupun alokasi belanja tidak langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan angka kemiskinan yang terjadi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan visi pemerintah untuk dapat mereduksi atau meminimalisasi kemiskinan melalui anggaran publik. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi et al. (2014) menunjukkan bahwasanya belanja langsung secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, dan belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Palayukan (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Karena alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang tepat dapat menunjang

penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pembangunan serta pelaksanaan program-program pendidikan dan kesehatan dasar yang berasal dari program pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah & Malik (2017) menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat KMS. Itu artinya bahwa peningkatan IPM yang di gambarkan oleh ketiga aspek yakni pertama, indeks harapan hidup belum menyentuh rakyat miskin secara keseluruhan, kedua, dimana pendidikan hanya di nikmati oleh segelintir orang-orang yang kaya dan belum mampu dirasakan oleh rakyat miskin secara keseluruhan serta yang ketiga, standar hidup layak masih sangat rendah di kalangan rakyat miskin.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

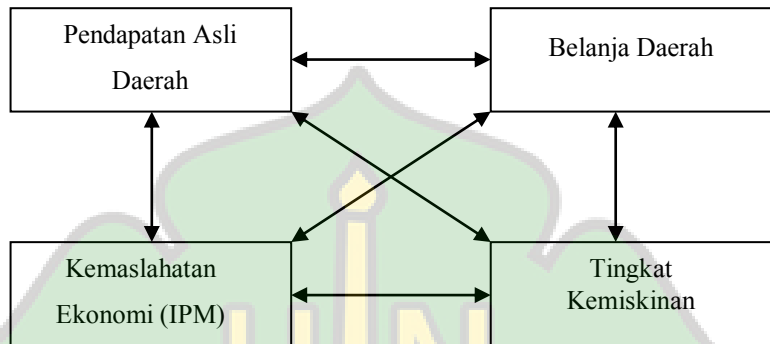
No	Judul Penelitian	Model Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Siregar & Ramadhan (2020) <i>“Pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah dan Pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara”</i>	Regresi Linier Berganda	Persamaan: Variabel : - Belanja Daerah - Kemiskinan Perbedaan: Variabel : - PAD - Kemaslahatan Ekonomi (IPM)

2	Frans et al (2017) <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris Pada Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015)”</i>	Regresi Data Panel	Persamaan: Variabel dependen : - PAD - Kemiskinan Perbedaan: Variabel : - Belanja Daerah - Kemaslahatan Ekonomi (IPM)
3	Joalini (2014) <i>“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”</i>	Regresi Linier Berganda	Persamaan: Variabel : - PAD - Belanja Daerah Perbedaan: Variabel : - Kemiskinan - Kemaslahatan Ekonomi (IPM)
4	Mubarrizi (2021) <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Provinsi Jawa Timur”</i>	Regresi Linier Sederana	Persamaan: Variabel : - PAD - Kemaslahatan Ekonomi (IPM) Perbedaan: Variabel : - Belanja Daerah - Kemiskinan
5	Lantu et al (2017) <i>“Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di kota Bitung”</i>	Regresi Linier Sederana	Persamaan: Variabel : - Belanja Daerah - Kemiskinan Perbedaan: Variabel : - PAD - Kemaslahatan Ekonomi (IPM)

6	Wahyudi et al (2014) <i>“Analisis belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh”</i>	Regresi Data Panel	Persamaan: Variabel : - Belanja Daerah - Kemiskinan Perbedaan: Variabel dependen : - PAD - Kemaslahatan Ekonomi (IPM)
7	Palayukan (2019) <i>“Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara”</i>	Regresi Data Panel	Persamaan: Variabel : - Belanja Daerah - Kemaslahatan Ekonomi (IPM) Perbedaan: Variabel : - PAD - Kemiskinan
8	Syaifullah & Malik (2017) <i>“ Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan ”</i>	Regresi Data Panel	Persamaan: Variabel : - Kemiskinan - Kemaslahatan Ekonomi (IPM) Perbedaan: Variabel : - PAD - Belanja Daerah

2.7 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pikir yang akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian:



2.8 Hipotesis Penelitian

H0.1: Tidak ada hubungan kausalitas antara belanja daerah dan pendapatan asli daerah

H1.1: Ada hubungan kausalitas antara belanja daerah dan pendapatan asli daerah

H0.2: Tidak ada hubungan kausalitas antara tingkat kemiskinan dan pendapatan asli daerah

H1.2: Ada hubungan kausalitas antara tingkat kemiskinan dan pendapatan asli daerah

H0.3: Tidak ada hubungan kausalitas antara kemaslahatan ekonomi (IPM) dan pendapatan asli daerah

H1.3: Ada hubungan kausalitas antara kemaslahatan ekonomi (IPM) dan pendapatan asli daerah

H0.4: Tidak ada hubungan kausalitas antara kemaslahatan ekonomi (IPM) dan belanja daerah

H1.4: Ada hubungan kausalitas antara kemaslahatan ekonomi (IPM) dan belanja daerah

H0.5: Tidak ada hubungan kausalitas antara kemiskinan dan belanja daerah

H1.5: Ada hubungan antara kausalitas antara kemiskinan dan belanja daerah

H0.6: Tidak ada hubungan kausalitas antara kemaslahatan ekonomi (IPM) dan kemiskinan

H1.6: Ada hubungan antara kausalitas antara kemaslahatan ekonomi (IPM) dan kemiskinan

BAB III METODO PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan antar bagian dan fenomena tersebut. Penelitian kuantitatif juga didefinisikan sebagai salah satu jenis penelitian yang datanya berupa angka-angka yang memungkinkan di analisis melalui pendekatan statistik (Hadi & Widyarini, 2009).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Dengan kata lain, data sekunder merupakan data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya atau mengambil data yang sudah tersedia di instansi-instansi tertentu dalam bentuk laporan. Data sekunder tersebut digunakan dalam bentuk data panel yaitu gabungan antara data seri waktu (*time series*) dan data wilayah (*cross section*).

Menurut Nuryanto dan Pambuko (2018), data panel terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu. Adapun objek dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah data sebanyak 161 data yang diperoleh dari Badan Pusat statistik

(BPS) Provinsi Aceh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, kemiskinan, dan IPM tahun 2014-2019.

3.3 Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan UU No. 32/2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Variabel pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2014-2019 yang dinyatakan dalam bentuk milyar rupiah.
Belanja Daerah	Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di suatu daerah yang meliputi belanja tidak langsung belanja langsung.

	Variabel belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2014-2019 yang dinyatakan dalam bentuk milyar rupiah.
Kemiskinan	Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Variabel kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini ialah data jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode tahun 2014-2019 yang dinyatakan dalam bentuk ribu jiwa.
Indeks Pembangunan Manusia	IPM sebagai indikator kemaslahatan ekonomi disebut juga dengan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indeks yang mengukur persentase pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang kesehatan (angka harapan hidup ketika lahir), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas) dan standar hidup layak (pengeluaran perkapita

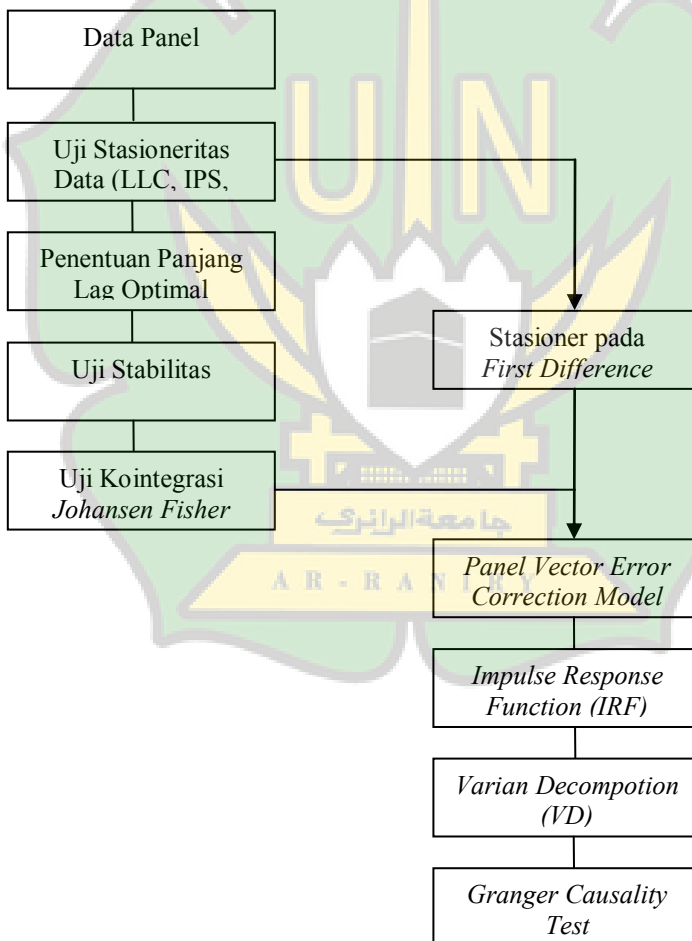
	yang telah disesuaikan menjadi prioritas daya beli). Manfaat dari IPM ialah dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan sebagai ukuran penentu kinerja pemerintah. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan dalam penelitian ini ialah data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2014-2019 yang dinyatakan dalam bentuk persen.
--	---

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu metode analisis *Panel Vector Autoregression* (PVAR) yang dilanjutkan dengan *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM) apabila data tidak stasioner pada level dan terkointegrasi. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, tingkat kemiskinan dan kemaslahatan ekonomi, tanpa diawali dengan argumentasi variabel dependen dan variabel independen antar variabel tersebut, dan data yang digunakan adalah data panel, maka model VAR yang digunakan adalah VAR data panel yang selanjutnya disebut *Panel Vector Autoregression* (PVAR).

Secara sistematis tahapan analisis data dimulai dari uji akar unit (stasioneritas data), penentuan panjang lag optimum, uji kointegrasi, estimasi persamaan PVAR/PVECM, uji stabilitas model hingga uji kausalitas dengan menggunakan metode *granger causality test*. Adapun tahapan pengolahan dari analisis data untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan dalam gambar 3.1

Gambar 3.1
Tahapan Analisis Data



3.4.1 Uji Stasioneritas Data

Data ekonomi *time series* umumnya bersifat stokastik atau memiliki tren yang tidak stasioner, artinya data tersebut memiliki akar unit. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan regresi lancung (*spurious regression*), akibatnya estimasi yang dihasilkan akan tidak akurat. Untuk dapat mengestimasi suatu model menggunakan data tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengujian stasioneritas data atau dikenal dengan *unit root test*, dengan menggunakan metode *Levin, Lin, & Chu (LLC) test*, *Im, Pesaran, Shin (IPS) test*, *Augmented Dickey-Fuller (ADF) test*, *Philips Perron test* (Ariyati, 2018).

Tipe pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Augmented Dickey Fuller (ADF) test* dan *Phillips-Perron (PP)* pada tingkat level. Dalam tes ADF dan PP, apabila nilai mutlak t -ADF dan t -PP lebih besar dari nilai mutlak *MacKinnon Critical Values*-nya maka data telah stasioner pada taraf nyata yang telah ditentukan. Jika data stasioner maka VAR dapat digunakan akan tetapi jika tidak stasioner maka ada dua pilihan yaitu menggunakan VAR dalam bentuk *first diference* atau VECM (Meilila, 2017).

3.4.2 Penentuan Panjang Lag Optimum

Pemeriksaan *lag* digunakan untuk menentukan panjang *lag* optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan menentukan estimasi parameter untuk model PVAR. Hal ini disebabkan karena estimasi hubungan kausalitas dan PVAR sangat

peka terhadap panjang *lag*. *Lag* optimal merupakan jumlah lag yang memberikan pengaruh yang signifikan sehingga perlu untuk melihat data kemudian menentukan ketepatan panjang lag (Ariyati, 2018).

Penentuan jumlah *lag* optimal yang digunakan merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam menggunakan model VAR. *Lag* optimal berguna untuk menunjukkan berapa lama reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya serta untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam model VAR. pengujian *lag* optimal dapat diidentifikasi dengan menggunakan kriteria *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SIC), dan *Hannan-Quinn Criterion* (HQ) (Meilila, 2017).

3.4.3 Uji Stabilitas

Uji stabilitas dilakukan untuk menguji apakah model estimasi PVAR/PVECM yang telah dibentuk sudah stabil atau belum, maka dilakukan pengecekan kondisi PVAR/PVECM *stability* berupa *roots of characteristic polynomial*. Model akan dikatakan stabil apabila seluruh *roots*-nya memiliki nilai modulus < 1 sehingga *Impuls Response Function* dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) yang dihasilkan dianggap valid.

3.4.4 Uji Kointegrasi

Metode kointegrasi dapat menggunakan metode Panel kointegrasi *Fisher Johansen*. Metode ini digunakan untuk memperoleh hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang telah memenuhi syarat dalam semua integrasi yaitu dimana semua variabel telah stationer pada derajat yang sama. Jika fenomena stasioneritas berada pada tingkat *first difference* atau $I(1)$, maka perlu dilakukan pengujian untuk melihat kemungkinan terjadi kointegrasi. Konsep kointegrasi pada dasarnya untuk melihat keseimbangan jangka panjang diantara variabel-variabel yang diobservasi (Ekananda, 2015).

3.4.5 Estimasi PVAR/ PVECM

Model *Vector Autoregressive* (VAR) biasanya digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Penggunaan VAR untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel dalam sistem dengan menambahkan *intercept*. Metode ini mulai dikembangkan oleh Sims pada tahun 1980, yang mengasumsikan bahwa semua variabel dalam model bersifat endogen (ditentukan dalam model) sehingga metode ini disebut sebagai model yang ateoritis (tidak berdasarkan teori) (Ekananda, 2015).

Pendekatan *Panel Vector Autoregression* (PVAR) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan VAR individu. Pertama, dapat menganalisa pengaruh waktu dan wilayah, Kedua dapat memodelkan hubungan antar wilayah, karena pendekatan panel menangkap heterogenitas antar wilayah. Salah satu kegunaan pengujian stasioneritas dan kointegrasi untuk menentukan metode VAR yang akan digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variabel stasioner atau tidak stasioner pada tingkat level. Jika data stasioner pada *first differences* dan *second differences* kemudian terdapat kointegrasi maka dapat menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM) (Ariyati, 2018).

Analisis kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, kemiskinan, dan kemaslahatan ekonomi yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan dengan menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM) yang merupakan pengembangan model VAR untuk menganalisis lebih mendalam dalam mempertimbangkan adanya perilaku data yang tidak stasioner pada level.

Agar analisis yang tidak dihasilkan dari regresi yang spurious maka variabel dalam model VAR di diferensi pada tingkat 1 agar diperoleh data yang stasioner. Analisis VECM mempertimbangkan adanya fluktuasi data disekitar tren jangka panjang sehingga model VECM digunakan untuk menganalisis adanya koreksi pada variabel dependen akibat adanya ketidakseimbangan pada beberapa variabel (Ekananda, 2015).

3.4.6 Uji Kausalitas

Analisis yang berkaitan dengan model PVAR/ PVECM untuk mencari hubungan sebab akibat atau uji kausalitas antar variabel endogen (*dependent*/terikat) didalam model PVAR/PVECM. Hubungan sebab akibat ini bisa di uji dengan menggunakan uji kausalitas Granger.

3.4.7 Impulse Response Function

Impulse Response Function (IRF) merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat seberapa lama guncangan (*shock*) dari satu variabel berpengaruh terhadap variabel lain dan juga menjelaskan seberapa lama variabel akan kembali ke titik keseimbangan setelah terjadi guncangan pada variabel lain.

3.4.8 Variance Decompositions

Variance Decompositions (VD) merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar guncangan dari sebuah variabel mempengaruhi variabel lain dan juga untuk menganalisis seberapa besar varian variabel dijelaskan oleh variabel itu sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga data yang telah dideskripsi tersebut menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang akan memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan antar variabel.

4.2 Analisis VECM

VECM digunakan untuk mengestimasi data yang tidak stasioner pada tingkat level, namun memiliki hubungan kointegrasi. Analisis VECM juga disebut sebagai model VAR restriksi dengan data tidak stationer namun terdapat hubungan kointegrasi. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa data tidak stasioner pada level namun terdapat hubungan kointegrasi melalui metode *Johansen Fisher*, sehingga dilanjutkan dengan metode VECM dengan berbagai uji-uji yang akan dilakukan.

4.3 Pembahasan

Dengan menggunakan metode VECM, maka uji yang akan dilakukan ialah sebagai berikut :

4.3.1 Uji Stasioneritas Data

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian pada umumnya cenderung mempunyai tren yang akan menyebabkan data tidak stasioner. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan regresi lancung (*spurious regression*), akibatnya estimasi yang dihasilkan akan tidak akurat, untuk mendapatkan estimasi yang baik maka data yang digunakan harus stasioner. Sehingga langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah dengan melakukan uji akar unit (*unit root test*) dengan menggunakan metode *Philips-Perron (PP) test*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Stasioneritas Data Metode *Philips-Perron Test*

Variabel	Level <i>P-Value</i>	Diferensiasi <i>P-Value</i>	Keterangan
	Phillips Perron Test	Phillips Perron Test	Phillips Perron Test
PAD	0.0000	0.0000	Stasioner Pada Orde 0
BD	0.0000	0.0000	Stasioner Pada Orde 0
KMS	0.9606	0.0000	Stasioner Pada Orde I
IPM	0.6383	0.0000	Stasioner Pada Orde I

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)
Keterangan: PAD (Pendapatan Asli Daerah); BD (Belanja Daerah); KMS (Kemiskinan); IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Berdasarkan Tabel 4.1 dengan menggunakan metode *Philips Perron test* dapat dilihat bahwa data KMS dan IPM merupakan data-data yang mengandung akar unit pada orde 0 (*level*) atau tidak stasioner pada orde 0 (*level*). Hal ini dapat dilihat pada saat orde 0 (*level*), *p-value* untuk masing-masing variabel lebih besar dari $\alpha = 5\%$, ini artinya menerima hipotesis H_0 yaitu terdapat akar unit pada data atau data tidak stasioner. Akibatnya, data perlu di diferensiasi agar mendapatkan data yang stasioner. Setelah dilakukan diferensiasi menunjukkan bahwa semua variabel diferensiasi pada orde I (*first differences*), hal ini dapat dilihat bahwa *p-value* untuk masing-masing variabel lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ artinya menolak hipotesis H_0 yaitu tidak terdapat akar unit pada data atau data sudah stasioner. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua data pada empat variabel yaitu PAD, BD, KMS dan IPM sudah stasioner pada orde I (*first differences*).

4.3.2 Penentuan Panjang Lag Optimum

Estimasi model VAR dimulai dengan menentukan berapa panjang lag yang tepat dalam model VAR. Penentuan panjangnya lag optimal merupakan hal penting dalam pemodelan VAR. Jika lag optimal yang dimasukkan terlalu pendek maka dikhawatirkan tidak dapat menjelaskan kedinamisan secara menyeluruh. Namun, lag optimal yang terlalu panjang akan menghasilkan estimasi yang tidak efisien karena berkurang *degree of freedom* (Basuki, 2016). Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat perlu untuk mengetahui lag optimal sebelum melakukan estimasi VAR.

Tabel 4.2
Hasil Uji Lag Optimal

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	1.10e+10	34.46927	34.55795*	34.50531
1	69.96226	7.99e+09	34.15312	34.59651	34.33328
2	58.40682	6.30e+09	33.91446	34.71255	34.23874
3	51.09993	5.21e+09	33.72201	34.87480	34.19041
4	22.14345	5.49e+09	33.77236	35.27986	34.38489
5	54.65042	4.27e+09	33.51440	35.37660	34.27105
6	66.43653	2.91e+09	33.12365	35.34056	34.02443*
7	28.85758*	2.83e+09*	33.08314*	35.65475	34.12804

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Keterangan: tanda * lag optimal yang diajukan

Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Lag 7 memiliki nilai *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC) dan *Hannan-Quinn Information* (HQ) terkecil. Artinya pengaruh optimal variabel terhadap variabel lain terjadi dalam horizon waktu 7 periode. Hal ini menunjukkan bahwa lag 7 akan digunakan untuk proses estimasi parameter *Vector Error Correction Model* (VECM).

4.3.3 Uji Kointegrasi Metode Johansen Fisher

Uji Kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang, yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini atau tidak. Uji kointegrasi dalam penelitian ini menggunakan *Johansen Fisher Panel Cointegration*

Test. Suatu persamaan dikatakan terkointegrasi pada nilai *probability* yang dihasilkan *At most 1*, *At most 2*, dan *At most 3* dengan ketentuan apabila nilai *probability* lebih besar dari 0.05 berarti tidak terdapat kointegrasi antar variabel. Sebaliknya jika nilai *probability* lebih kecil dari 0.05 berarti terdapat kointegrasi antar variabel.

Tabel 4.3
Hasil Uji Kointegrasi *Johansen Panel Cointegration*

Hypothesized	Fisher Stat.* (from trace test)	Prob.	Fisher Stat.* (from max- eigen test)	Prob.
None	178.7744	0.0001	82.27764	0.0000
At most 1	96.49672	0.0000	46.11934	0.0000
At most 2	50.37738	0.0000	27.40806	0.0000
At most 3	22.96932	0.0000	22.96932	0.0000

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hasil uji *Johansen Fisher Cointegration Test* pada PAD, BD, KMS dan IPM menunjukkan nilai *probability* untuk masing-masing persamaan tersebut lebih kecil dari 0.05 artinya terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara PAD, BD, KMS dan IPM.

4.3.4 Uji Stabilitas Vector Autoregression

Pengujian stabilitas VAR menggunakan *Root of Characteristic Polymonial*. Ketika nilai dari *Root* dan *Modulus Polymonial* kurang dari 1(<1) berarti variabel tersebut stabil.

Tabel 4.4
Hasil Uji Stabilitas

Root	Modulus
-0.513192 - 0.539697i	0.744741
-0.513192 + 0.539697i	0.744741
0.173847 - 0.438721i	0.471909
0.173847 + 0.438721i	0.471909
-0.161817 - 0.256114i	0.302950
-0.161817 + 0.256114i	0.302950
-0.230751	0.230751
0.172644	0.172644

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.5 nilai dari *Root* dan *Modulus* kurang dari 1(<1), sehingga artinya model yang digunakan sudah stabil. Dengan demikian, hasil analisis IRF (*Impulse Response Function*) dan VD (*Variance Decomposition*) adalah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji kausalitas *granger*.

4.3.5 Uji Panel Vector Error Correction Model

Panel *Vector Error Autoregression* (P-VECM) adalah uji untuk melihat variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan dua estimasi parameter yaitu parameter hubungan keseimbangan jangka panjang dan parameter hubungan jangka pendek. Pada penelitian ini menggunakan lag 7 berdasarkan *lag length criteria*.

4.3.5.1 Hubungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Tabel 4.5
Hubungan Jangka Panjang

Cointegrating Eq:	CointEq1	CointEq2	CointEq3	
D(PAD(-1))	1.000000	0.000000	0.000000	
D(BD(-1))	0.000000	1.000000	0.000000	
D(KMS(-1))	0.000000	0.000000	1.000000	
D(IPM(-1))	-106.3663 (21.5354) [-4.93914]	-107.3464 (21.4659) [-5.00078]	0.243987 (0.16205) [1.50559]	
Error Correction:	D(PAD,2)	D(BD,2)	D(KMS,2)	D(IPM,2)
CointEq1	8.713611 (5.27476) [1.65194]	14.95975 (5.26552) [2.84108]	-0.006448 (0.04288) [-0.15038]	0.132979 (0.04717) [2.81909]
CointEq2	-9.619674 (5.33735) [-1.80233]	-15.87780 (5.32800) [-2.98007]	0.003040 (0.04338) [0.07008]	-0.124858 (0.04773) [-2.61590]
CointEq3	59.07492 (36.4887) [1.61899]	55.27573 (36.4248) [1.51753]	-1.773622 (0.29660) [-5.97992]	0.657667 (0.32631) [2.01547]

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Keterangan: - Angka dalam () adalah standar error

- Angka dalam [] adalah nilai statistic

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hubungan jangka panjang pada variabel PAD, BD, KMS, dan IPM, dengan *t-table* adalah 1.981. Sehingga variabel yang memiliki hubungan jangka panjang adalah BD, KMS dan IPM yang dibuktikan dengan *nilai t-statistic* > dari pada nilai *t-table*.

4.3.5.2 Persamaan Hubungan Jangka Pendek

Tabel 4.6
Hubungan Jangka Pendek

Error Correction:	D(PAD,2)	D(BD,2)	D(KMS,2)	D(IPM,2)
D(PAD(-1),2)	-9.216049 (4.88581) [-1.88629]	-13.33983 (4.87724) [-2.73512]	0.003635 (0.03971) [0.09153]	-0.126663 (0.04369) [-2.89897]
D(PAD(-2),2)	-8.219078 (4.13833) [-1.98609]	-11.35985 (4.13107) [-2.74985]	0.007547 (0.03364) [0.22437]	-0.114344 (0.03701) [-3.08972]
D(PAD(-3),2)	-5.956888 (3.25396) [-1.83066]	-8.223407 (3.24825) [-2.53164]	0.014512 (0.02645) [0.54867]	-0.093113 (0.02910) [-3.19985]
D(PAD(-4),2)	-3.213324 (2.36513) [-1.35862]	-4.584799 (2.36099) [-1.94190]	0.016985 (0.01922) [0.88349]	-0.072453 (0.02115) [-3.42554]
D(PAD(-5),2)	-1.107657 (1.45482) [-0.76137]	-1.652154 (1.45227) [-1.13764]	0.009745 (0.01183) [0.82405]	-0.042823 (0.01301) [-3.29152]
D(PAD(-6),2)	-0.689355 (0.63872) [-1.07928]	-0.862534 (0.63760) [-1.35279]	0.003167 (0.00519) [0.60999]	-0.019429 (0.00571) [-3.40152]
D(BD(-1),2)	8.935568 (4.93572)	13.08730 (4.92707)	0.000280 (0.04012)	0.118362 (0.04414)

	[1.81039]	[2.65620]	[0.00698]	[2.68158]
D(BD(-2),2)	8.132542 (4.17795) [1.94654]	11.26192 (4.17063) [2.70029]	-0.005364 (0.03396) [-0.15794]	0.108202 (0.03736) [2.89603]
D(BD(-3),2)	5.888086 (3.28938) [1.79003]	8.092919 (3.28362) [2.46464]	-0.012753 (0.02674) [-0.47698]	0.088502 (0.02942) [3.00863]
D(BD(-4),2)	3.030188 (2.38642) [1.26977]	4.351577 (2.38223) [1.82668]	-0.013652 (0.01940) [-0.70379]	0.066980 (0.02134) [3.13856]
D(BD(-5),2)	0.912533 (1.45713) [0.62625]	1.426367 (1.45458) [0.98061]	-0.007056 (0.01184) [-0.59572]	0.037749 (0.01303) [2.89695]
D(BD(-6),2)	0.616295 (0.62968) [0.97874]	0.799708 (0.62858) [1.27225]	-0.003995 (0.00512) [-0.78061]	0.018501 (0.00563) [3.28547]
D(KMS(-1),2)	-53.38038 (31.1581) [-1.71321]	-48.67676 (31.1035) [-1.56499]	0.684962 (0.25327) [2.70451]	-0.552398 (0.27864) [-1.98249]
D(KMS(-2),2)	-48.24628 (27.7418) [-1.73912]	-44.81670 (27.6932) [-1.61833]	0.699173 (0.22550) [3.10058]	-0.524460 (0.24809) [-2.11401]
D(KMS(-3),2)	-34.67672 (24.5826) [-1.41062]	-31.52698 (24.5395) [-1.28474]	0.659125 (0.19982) [3.29863]	-0.436420 (0.21984) [-1.98521]
D(KMS(-4),2)	-30.09016 (21.6253) [-1.39143]	-25.33400 (21.5874) [-1.17356]	0.585856 (0.17578) [3.33290]	-0.391708 (0.19339) [-2.02549]
D(KMS(-5),2)	-24.65601 (17.9826) [-1.37110]	-19.60059 (17.9511) [-1.09189]	0.479958 (0.14617) [3.28354]	-0.383033 (0.16081) [-2.38184]
D(KMS(-6),2)	-4.919714 (12.7762) [-0.38507]	-0.509241 (12.7538) [-0.03993]	0.085260 (0.10385) [0.82099]	-0.067122 (0.11425) [-0.58748]
D(IPM(-1),2)	-105.9127 (32.9706) [-3.21234]	-109.7239 (32.9128) [-3.33378]	-0.110657 (0.26800) [-0.41290]	-0.298751 (0.29485) [-1.01324]

D(IPM(-2),2)	-107.9249 (30.5524) [-3.53246]	-111.8011 (30.4988) [-3.66575]	-0.020217 (0.24834) [-0.08141]	-0.314740 (0.27322) [-1.15196]
D(IPM(-3),2)	-88.75744 (27.1733) [-3.26635]	-92.40222 (27.1257) [-3.40645]	-0.057601 (0.22088) [-0.26078]	-0.216529 (0.24300) [-0.89105]
D(IPM(-4),2)	-65.35413 (23.8102) [-2.74479]	-65.24435 (23.7685) [-2.74499]	-0.084290 (0.19354) [-0.43552]	-0.143747 (0.21293) [-0.67510]
D(IPM(-5),2)	-63.91291 (20.5163) [-3.11522]	-63.72126 (20.4804) [-3.11133]	-0.164533 (0.16677) [-0.98661]	-0.052650 (0.18347) [-0.28696]
D(IPM(-6),2)	-13.13116 (16.5907) [-0.79148]	-14.83548 (16.5616) [-0.89577]	0.169072 (0.13486) [1.25372]	-0.144662 (0.14837) [-0.97503]
R-squared	0.776226	0.809680	0.705319	0.706664
Adj. R-squared	0.719740	0.761638	0.630933	0.632618
Sum sq. resid	7181889.	7156739.	474.5179	574.3542
S.E. equation	264.0588	263.5961	2.146385	2.361409
F-statistic	13.74179	16.85360	9.481938	9.543570
Log likelihood	-894.2320	-894.0040	-268.6217	-281.0333
Akaike AIC	14.17280	14.16929	4.548027	4.738974
Schwarz SC	14.76837	14.76486	5.143591	5.334538
Mean dependent	-0.391385	-0.545154	-0.034692	0.001538
S.D. dependent	498.7927	539.9089	3.533095	3.895939

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Keterangan: - Angka dalam () adalah standar error

- Angka dalam [] adalah nilai statistic

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan hubungan jangka pendek, dengan *t-table* adalah 1.981. Sehingga variabel yang memiliki hubungan jangka pendek adalah yang memiliki nilai *t-statistic* > 1.981. Hasil hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel yang memiliki hubungan jangka panjang ialah BD, KMS, dan IPM. Dalam hubungan jangka pendek PAD tidak berpengaruh terhadap KMS,

namun PAD berpengaruh terhadap BD dan secara negatif berpengaruh terhadap IPM. Kemudian BD pada jangka pendek tidak dipengaruhi oleh KMS, namun BD secara positif mempengaruhi IPM. Sedangkan KMS berpengaruh negatif terhadap IPM.

Pada persamaan jangka pendek dalam penelitian ini, PAD tidak dipengaruhi oleh KMS dan sebaliknya KMS tidak dipengaruhi oleh PAD. Artinya ketika PAD meningkat maka tidak diiringi dengan penurunan tingkat KMS. Karena bisa saja pengelolaan PAD tidak berfokus pada pengurangan tingkat KMS di daerah tersebut selama periode tertentu, namun pengelolaannya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya atau bahkan pengelolaan PAD tersebut tidak tepat sasaran. Sehingga penurunan KMS tersebut tidak dipengaruhi oleh PAD, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Siregar & Ramadhan (2020) yang menunjukkan bahwasanya PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang diakibatkan oleh tata kelola pendapatan suatu daerah itu yang mungkin belum tepat sasaran sehingga pendapatan asli daerah tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

PAD berpengaruh positif terhadap BD, begitupun sebaliknya. Jika ada peningkatan jumlah PAD maka akan terjadi peningkatan pula pada BD yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya

pemerintah daerah telah mampu menggali potensi sumber-sumber keuangannya yang berupa PAD dan kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerahnya. Pemerintah daerah selain bergantung pada pemerintah pusat berupa transfer dana perimbangan dari pusat dalam membiayai belanja daerahnya, mereka juga bisa mendanai belanja daerahnya dengan memanfaatkan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap BD. Artinya, peningkatan jumlah PAD akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah BD yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

PAD secara negatif dipengaruhi oleh IPM, bisa saja kemandirian ekonomi masyarakat sudah mencukupi kebutuhannya baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya sehingga PAD tidak berpengaruh besar pada peningkatan IPM, melainkan ada faktor lain yang lebih mempengaruhinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarrizi (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat berfungsi sebagai sarana pendukung dalam peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain secara mandiri masyarakat dapat berperan aktif dalam mencapai kesejahteraannya,

sedangkan sarana pendukungnya adalah dari pembangunan fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

BD tidak dipengaruhi oleh KMS, sebaliknya KMS juga tidak dipengaruhi oleh BD. Hal ini dapat terjadi karena pengeluaran-pengeluaran daerah yang telah dialokasikan oleh pemerintah tidak secara langsung difokuskan pada pemberantasan kemiskinan. Sehingga pengeluaran tersebut daerah masih belum dapat memberantas kemiskinan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lantu et al. (2017) yang memperoleh hasil bahwa alokasi belanja daerah baik melalui alokasi belanja langsung maupun alokasi belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap perubahan angka kemiskinan yang terjadi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan visi pemerintah untuk dapat mereduksi atau meminimalisasi kemiskinan melalui anggaran publik.

BD secara positif juga dipengaruhi oleh IPM sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palayukan (2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM. Karena alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang tepat dapat menunjang penyediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pembangunan serta pelaksanaan program-program pendidikan dan kesehatan dasar yang berasal dari program pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan manusia.

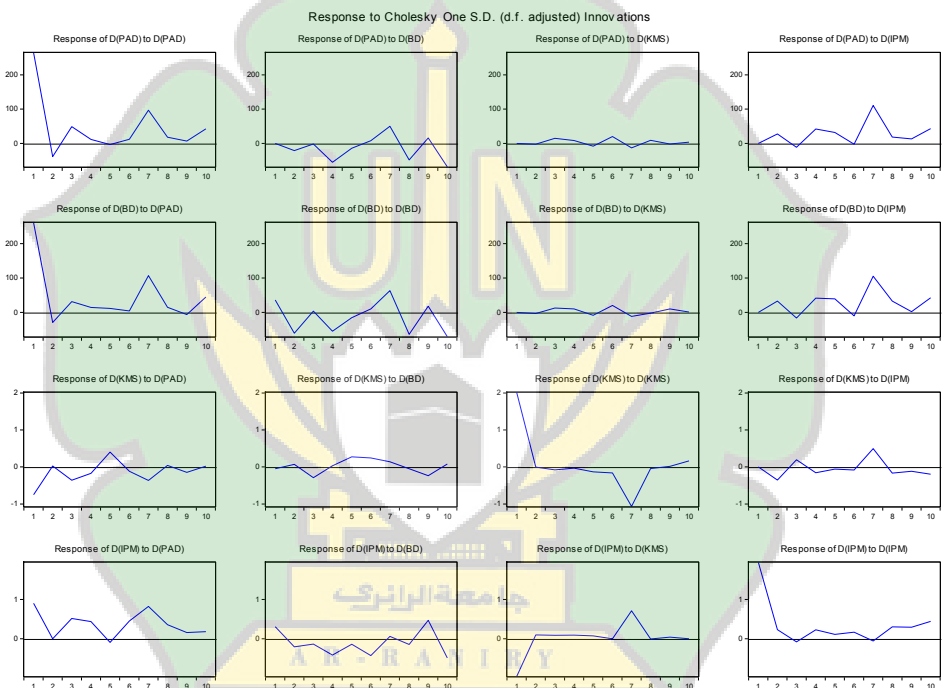
Secara negatif KMS dipengaruhi IPM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah & Malik (2017) yaitu bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat KMS. Itu artinya bahwa peningkatan IPM yang di gambarkan oleh ketiga aspek yakni pertama, indeks harapan hidup belum menyentuh rakyat miskin secara keseluruhan, kedua, dimana pendidikan hanya di nikmati oleh segelintir orang-orang yang kaya dan belum mampu dirasakan oleh rakyat miskin secara keseluruhan serta yang ketiga, standar hidup layak masih sangat rendah di kalangan rakyat miskin.

4.3.6 Hasil Analisis Impulse Response Function (IRF)

Impulse Response Function (IRF) digunakan untuk menggambarkan respon variabel endogen dari waktu ke waktu terhadap guncangan (*shock*) variabel tertentu dan berapa lama guncangan tersebut terjadi. Sumbu horizontal merupakan variabel waktu dalam periode hari kedepan setelah terjadi *shock*, sedangkan sumbu vertikal adalah nilai respon. Secara mendasar dalam analisis ini akan diketahui respon positif atau negatif dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jika *impulse response* menunjukkan pergerakan yang semakin mendekati titik keseimbangan (*convergence*) atau kembali ke keseimbangan sebelumnya bermakna respon suatu variabel suatu kejutan makin lama akan menghilang sehingga kejutan tersebut tidak meninggalkan pengaruh permanen terhadap variabel tersebut (Basuki, 2016). Untuk memudahkan interpretasi, hasil analisis yang disajikan

dalam bentuk grafik dengan 10 periode. Hasil pengujian ini berupa grafik dimana respon tersebut akan menunjukkan respon positif atau respon negatif dari variabel yang digunakan. Hasil *Impulse Response Function* (IRF) dapat dilihat pada berikut:2

Gambar 4.1
Respon Masing-masing variabel



Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa *impulse response* menunjukkan pergerakan yang semakin mendekati titik keseimbangan (*convergence*) di setiap model pengaruh antar variabel.

Dari gambar diatas dapat kita lihat respon IPM terhadap guncangan PAD. Guncangan yang terjadi fluktuatif, dimana pada periode pertama memberikan respon yang positif kemudian pada periode kedua berada pada garis keseimbangan. Pada periode ketiga dan keempat menunjukkan respon positif, namun pada periode kelima berada dibawah garis keseimbangan dan memiliki respon negatif. Tetapi pada periode selanjutnya sampai dengan periode kesepuluh kembali memberikan respon yang positif.

Jika IRF berada diatas garis keseimbangan, maka respon variabel yang dianalisis adalah positif atau mengalami kenaikan, sedangkan jika grafik IRF berada dibawah garis keseimbangan, maka respon variabel adalah negatif atau mengalami penurunan. Ketika respon yang diberikan negatif, artinya IPM mengalami peningkatan sehingga PAD akan menurun. Namun ketika respon yang diberikan positif artinya selama periode tertentu jika IPM mengalami peningkatan maka PAD juga mengalami peningkatan. Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa respon IPM terhadap guncangan PAD cenderung berada diatas garis keseimbangan atau memiliki pengaruh positif, artinya apabila IPM meningkat maka PAD juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terampil serta memiliki karakteristik yang mumpuni, maka SDM tersebut dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengelola potensi yang dimiliki daerah sehingga daerah akan memperoleh hasil dan menjadi salah satu sumber pemasukan serta

akan meningkatkan kemandirian bagi daerah tersebut.

Dari gambar diatas dapat kita lihat respon IPM terhadap guncangan BD. Pada periode pertama memberikan respon yang positif, kemudian pada periode kedua sampai keenam respon yang diberikan yaitu negatif. Pada periode ketujuh dan kesembilan memberikan respon positif dan berada diatas garis keseimbangan dan pada periode selanjutnya kembali memberikan respon negatif.

Dari gambar diatas dapat kita lihat respon IPM terhadap guncangan kemiskinan cenderung memberikan respon yang mendekati garis keseimbangan artinya pada periode pertama memberikan respon yang negatif, kemudian pada periode kedua sampai dengan periode keenam memiliki respon yang positif dan mendekati garis keseimbangan. Namun pada periode ketujuh memiliki respon positif pada garis keseimbangan yang lebih tinggi daripada periode periode sebelumnya. Kemudian periode kedelapan sampai dengan periode kesepuluh kembali berada pada garis keseimbangan dan memiliki respon positif.

4.3.7 Hasil Analisis Varian Decomposition (VD)

Analisis ini bertujuan untuk mengukur komposisi atau kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari *Variance Decomposition* secara berurutan diakibatkan oleh guncangan itu sendiri atau variabel lain.

Tabel 4.7
Varian Dekomposisi PAD

Variance Decomposition of
D(PAD):

Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	264.0588	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	269.1195	98.33019	0.600571	0.006594	1.062649
3	274.1636	97.93652	0.582650	0.286639	1.194191
4	283.1333	92.00034	4.362404	0.350017	3.287237
5	285.3625	90.58359	4.528817	0.423924	4.463667
6	286.4363	90.09054	4.565433	0.908225	4.435800
7	326.1135	78.33696	5.868894	0.854487	14.93966
8	330.7690	76.43487	7.831355	0.904868	14.82891
9	331.4881	76.14453	8.026036	0.903320	14.92612
10	343.8087	72.31110	11.39741	0.848848	15.44264

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa pada horizon prediksi 2 tahun PAD, sekitar 98,33% varian dari prediksi bersumber dari variabel PAD itu sendiri. Sisanya sebesar 0,6% bersumber dari BD, 0,006% dari KMS dan 1% dari IPM. Selanjutnya pada horizon prediksi 10 tahun PAD, sebesar 72.31% varian prediksi bersumber dari PAD itu sendiri, dan sisanya sebesar 11.3 % bersumber dari BD, 0.84% dari KMS dan 15.44% dari IPM.

Tabel 4.8
Varian Dekomposisi BD

Variance Decomposition of
D(BD):

Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	263.5961	98.08440	1.915599	0.000000	0.000000
2	274.0232	91.90678	6.638606	0.011293	1.443321
3	276.6771	91.46580	6.532759	0.233228	1.768210

4	285.6426	86.07398	9.798434	0.344835	3.782750
5	289.1440	84.17279	9.846729	0.422834	5.557650
6	290.2370	83.56539	9.892606	0.905885	5.636115
7	333.1470	73.74350	11.12394	0.806390	14.32617
8	341.1490	70.52040	14.10461	0.772979	14.60201
9	341.8462	70.26502	14.32771	0.860637	14.54664
10	354.4928	66.95597	17.26031	0.801618	14.98210

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa pada horizon prediksi 2 tahun BD, sekitar 91.90% varian dari prediksi bersumber dari variabel PAD. Sisanya sebesar 6.63% bersumber dari BD itu sendiri, 0.01% dari KMS dan 1.44% dari IPM. Selanjutnya pada horizon prediksi 10 tahun BD, sebesar 66.9% varian prediksi bersumber dari PAD, dan sisanya sebesar 17.26 % bersumber dari BD itu sendiri, 0.80% dari KMS dan 14.98% dari IPM.

Tabel 4.9
Varian Dekomposisi KMS

Variance Decomposition of D(KMS):					
Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	2.146385	12.21119	0.050722	87.73809	0.000000
2	2.177076	11.88232	0.150105	85.28196	2.685610
3	2.235588	13.87183	1.817230	81.00023	3.310703
4	2.248470	14.31103	1.815718	80.09896	3.774285
5	2.304462	16.64903	3.108134	76.58312	3.659717
6	2.327697	16.58340	4.146071	75.54944	3.721086
7	2.638043	14.81612	3.500710	75.24131	6.441859
8	2.644387	14.76909	3.516260	74.91028	6.804371
9	2.661455	14.87761	4.255935	73.95623	6.910231
10	2.674859	14.73391	4.300495	73.58373	7.381868

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa pada horizon prediksi 2 tahun KMS, sekitar 11.88% varian dari prediksi bersumber dari variabel PAD. Sisanya sebesar 0,15% bersumber dari BD, 85% dari KMS itu sendiri dan 2.6% dari IPM. Selanjutnya pada horizon prediksi 10 tahun KMS, sebesar 14.73% varian prediksi bersumber dari PAD, dan sisanya sebesar 4.30 % bersumber dari BD, 73.5% dari KMS itu sendiri dan 7.38% dari IPM.

Tabel 4.10
Varian Dekomposisi IPM

Variance Decomposition of D(IPM):

Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	2.361409	14.56793	1.679787	16.29346	67.45882
2	2.383750	14.29617	2.389952	16.15483	67.15904
3	2.445238	18.02088	2.568642	15.48177	63.92870
4	2.530352	19.80118	5.074820	14.59477	60.52923
5	2.539495	19.79502	5.339485	14.57981	60.28569
6	2.620308	21.58503	7.685674	13.69440	57.03489
7	2.838894	26.82038	6.591817	17.95836	48.62944
8	2.881163	27.59120	6.645345	17.43536	48.32809
9	2.938368	26.82017	8.928394	16.78511	47.46633
10	3.016740	25.81386	11.08730	15.92432	47.17452

Sumber: Data Sekunder diolah (2021)

Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa pada horizon prediksi 2 tahun IPM, sekitar 14.29% varian dari prediksi bersumber dari variabel PAD. Sisanya sebesar 2.3% bersumber dari BD, 16.15% dari KMS dan 67% dari IPM itu sendiri. Selanjutnya pada horizon prediksi 10 tahun IPM, sebesar 25% varian prediksi bersumber dari PAD, dan sisanya sebesar 11.08 % bersumber dari BD, 15.92% dari

KMS dan 47.17% dari IPM itu sendiri.

4.3.8 Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas granger bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf uji yang digunakan dalam uji kausalitas *granger* ini yaitu pada tingkat kepercayaan 0.05 (5%) dan panjang lag sampai dengan lag 7 sesuai dengan pengujian lag optimum yang dilakukan. Dapat disimpulkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi kausalitas antar variabel, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka terjadi kausalitas antar variabel.

Hasil uji kausalitas *granger* dengan menggunakan *Pairwise Granger Causality Test* ditunjukkan dalam tabel 4.12

Tabel 4.11
Hasil uji kausalitas granger dengan menggunakan *Pairwise Granger Causality Test*

Hubungan	Hubungan I (P-Value < 0.05)	Hubungan II (P-Value < 0.05)	Hasil Kausalitas
BD dan PAD	0.0013	0.0020	Hubungan Dua Arah (BD $\leftrightarrow$ PAD)
KMS dan PAD	0.4801	0.0005	Hubungan satu arah Arah (PAD $\rightarrow$ KMS)
IPM dan PAD	0.0408	0.0001	Hubungan Dua Arah (IPM $\leftrightarrow$ PAD)

KMS dan BD	0.5652	0.0004	Hubungan satu arah Arah (BD→KMS)
IPM dan BD	0.0861	1.E-05	Hubungan satu arah Arah (BD→IPM)
IPM dan KMS	0.6958	0.2801	Tidak ada Hubungan

Berdasarkan tabel 4.12 Variabel PAD secara signifikan mempengaruhi variabel BD dan sebaliknya variabel BD secara signifikan mempengaruhi variabel PAD yang dibuktikan dengan nilai prob masing-masing variabel lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.0013 dan 0.0020. Maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh atau terdapat kausalitas dua arah antara PAD dan BD.

Variabel PAD secara signifikan mempengaruhi variabel KMS namun tidak sebaliknya variabel KMS tidak secara signifikan mempengaruhi variabel PAD yang dibuktikan dengan nilai prob variabel lebih kecil dari 0.05 hanya hubungan PAD terhadap KMS yaitu 0.005. Maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh atau terdapat kausalitas satu arah antara PAD dan KMS.

Variabel IPM secara signifikan mempengaruhi variabel PAD dan sebaliknya variabel PAD secara signifikan mempengaruhi variabel IPM yang dibuktikan dengan nilai prob masing-masing variabel lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.0408 dan 0.0001. Maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh atau terdapat kausalitas dua arah antara IPM dan PAD.

Variabel BD secara signifikan mempengaruhi variabel KMS namun tidak sebaliknya variabel KMS tidak secara signifikan mempengaruhi variabel BD yang dibuktikan dengan nilai prob variabel lebih kecil dari 0.05 hanya hubungan BD terhadap KMS yaitu 0.0004. Maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh atau terdapat kausalitas satu arah antara BD dan KMS.

Variabel BD secara signifikan mempengaruhi variabel IPM namun tidak sebaliknya variabel IPM tidak secara signifikan mempengaruhi variabel BD yang dibuktikan dengan nilai prob variabel lebih kecil dari 0.05 hanya hubungan BD terhadap IPM yaitu 1.E-05. Maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh atau terdapat kausalitas satu arah antara BD dan IPM.

Variabel IPM tidak secara signifikan mempengaruhi variabel KMS dan sebaliknya variabel KMS tidak secara signifikan mempengaruhi variabel IPM yang dibuktikan dengan nilai prob masing-masing variabel lebih besar dari 0.05 yaitu 0.0695 dan 0.2801. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi pengaruh atau tidak terdapat kausalitas dua arah maupun satu arah antara IPM dan KMS.

Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah dari BD ke PAD dan IPM ke PAD. Artinya BD dan IPM berpengaruh terhadap PAD dan sebaliknya PAD berpengaruh terhadap BD dan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika PAD meningkat maka BD juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan IPM dan akan menghasilkan kualitas sumber daya

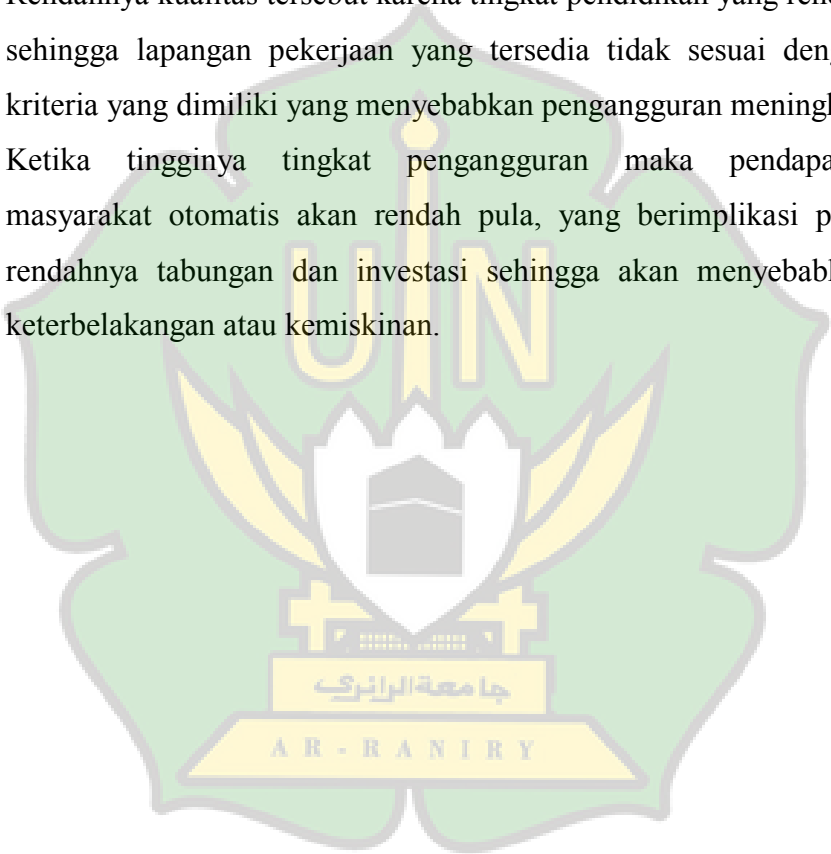
manusia yang terampil dan memiliki karakteristik yang mumpuni. Namun KMS dan PAD memiliki hubungan kausalitas satu arah dari KMS ke PAD. Artinya KMS tidak berpengaruh terhadap PAD dan sebaliknya PAD berpengaruh terhadap KMS. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi PAD tidak dapat secara langsung menurunkan kemiskinan di daerah tersebut, dikarenakan ada faktor lain yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan.

Variabel IPM dan KMS terdapat hubungan satu arah terhadap BD. Artinya IPM dan KMS tidak berpengaruh terhadap BD, sebaliknya BD berpengaruh terhadap IPM dan juga KMS. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi BD tidak dapat secara langsung menurunkan KMS dan meningkatkan IPM, dikarenakan ada faktor lain yang dapat meningkatkan IPM dan menurunkan tingkat KMS.

Variabel KMS dan IPM tidak terdapat hubungan diantara keduanya, yang mana artinya variabel KMS tidak berpengaruh terhadap IPM, begitu pula sebaliknya IPM tidak berpengaruh terhadap KMS.

Namun apabila di suatu daerah pengelolaan PAD dan BD tepat sasaran dan dialokasikan ke hal produktif yang fokus pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka seiring dengan berjalannya waktu tingkat KMS dengan perlahan akan menurun dan akan meningkatkan IPM yang ditandai dengan kualitas sumber daya yang baik pula melalui tercapainya tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Sehingga

kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi yang tercermin dari tingkat IPM, karena manusia merupakan subjek maupun objek dari pembangunan. Kualitas SDM yang rendah berarti produktivitas juga rendah. Rendahnya kualitas tersebut karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kriteria yang dimiliki yang menyebabkan pengangguran meningkat. Ketika tingginya tingkat pengangguran maka pendapatan masyarakat otomatis akan rendah pula, yang berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi sehingga akan menyebabkan keterbelakangan atau kemiskinan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

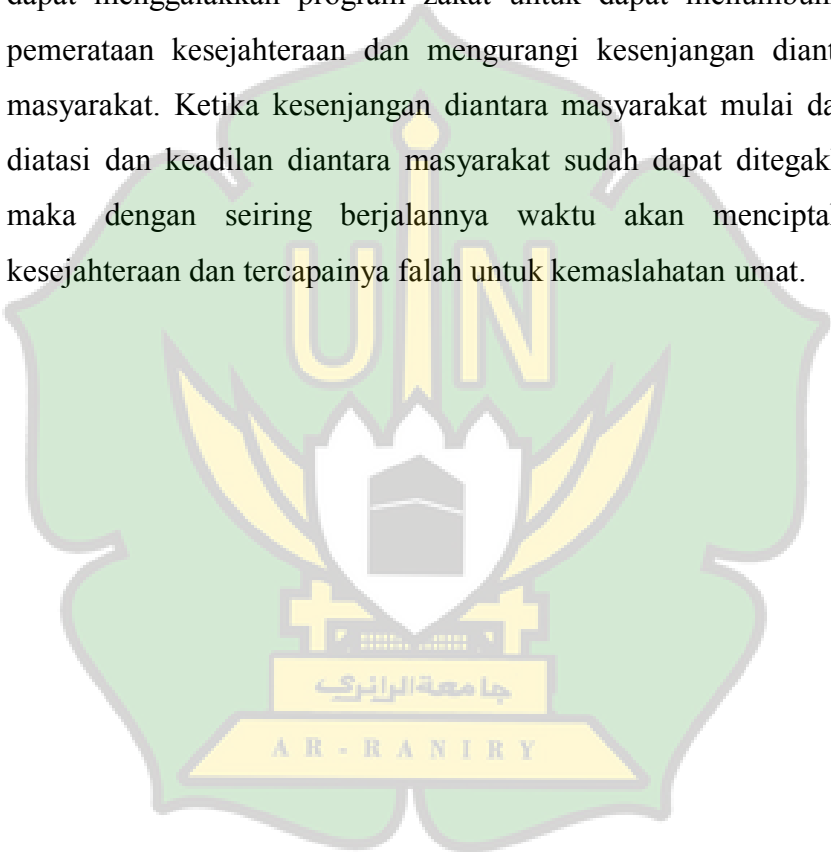
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya terdapat hubungan antar variabel yaitu variabel yang memiliki hubungan jangka panjang ialah BD, KMS, dan IPM. Sedangkan dalam hubungan jangka pendek PAD tidak berpengaruh terhadap KMS, namun PAD berpengaruh terhadap BD dan secara negatif berpengaruh terhadap IPM. Kemudian BD pada jangka pendek tidak dipengaruhi oleh KMS, namun BD secara positif mempengaruhi IPM. Sedangkan KMS berpengaruh negatif terhadap IPM.
2. Berdasarkan hasil *granger causality test*, terdapat hubungan kausalitas dua arah dari BD ke PAD dan IPM ke PAD. Artinya BD dan IPM berpengaruh terhadap PAD dan sebaliknya PAD berpengaruh terhadap BD dan IPM. Pada variabel IPM dan KMS terdapat hubungan satu arah terhadap BD. Artinya IPM dan KMS tidak berpengaruh terhadap BD, sebaliknya BD berpengaruh terhadap IPM dan juga KMS. Sedangkan variabel KMS dan IPM tidak terdapat hubungan diantara keduanya, yang mana artinya variabel KMS tidak berpengaruh terhadap IPM, begitu pula sebaliknya IPM tidak berpengaruh terhadap KMS.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil kebijakan strategis untuk melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan PAD secara optimal dengan cara menggali, mengembangkan, dan mengolah potensi maupun sumber daya yang tersedia. Kemudian pemerintah daerah juga perlu adanya kebijakan ataupun regulasi yang ketat untuk setiap pengalokasian pendapatan dan pengeluaran daerah agar tepat sasaran dan digunakan untuk hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan yang memadai untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Yang pada akhirnya kemiskinan dapat diminimalisasi melalui berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah baik dengan meningkatkan pelayanan terhadap penduduk miskin dalam bidang pendidikan agar dapat mendorong anak-anak usia sekolah untuk sekolah dengan cara memberikan motivasi pentingnya pendidikan, memberikan beasiswa dan memberikan pelatihan kepada guru-guru. kesehatan, dan ekonomi, serta menggalakkan program zakat untuk dapat menumbuhkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan diantara masyarakat. Dalam bidang pendidikan dapat mendorong anak-anak usia sekolah untuk sekolah dengan cara memberikan motivasi pentingnya pendidikan, memberikan beasiswa dan memberikan pelatihan kepada guru-guru. Dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan pelayanan

kesehatan terutama kepada masyarakat miskin untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan berperilaku hidup sehat. Dalam bidang ekonomi yang dapat mendorong masyarakat agar bekerja dengan memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian juga dapat menggalakkan program zakat untuk dapat menumbuhkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan diantara masyarakat. Ketika kesenjangan diantara masyarakat mulai dapat diatasi dan keadilan diantara masyarakat sudah dapat ditegakkan maka dengan seiring berjalannya waktu akan menciptakan kesejahteraan dan tercapainya falah untuk kemaslahatan umat.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan: Panel data 8 provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 1(1), 1-11.
- Ariyati, N. (2018). Analisis kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kemiskinan dan pengangguran (data panel kabupaten/kota di Aceh). *Skripsi*. UIN Ar-raniry Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). *Statistik keuangan pemerintah daerah provinsi Aceh 2017-2018*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2019). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di provinsi Aceh 2005- 2019*.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 63-65.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Riau. *JOM Fekon*, 4(1), 870-882.
- Ekananda, M. (2015). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Frans, D., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan (studi empiris pada kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 4(2), 1666.

- Hadi, S. & Widyarini. (2009). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: Ekonosia FE.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hobrouw, Y.A., Suaryana, I G.N.A., & Putri, I G.A.M. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan indeks pembangunan manusia. *Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401- 413.
- Idarwati., Ratna., & Maisyuri. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 3(3), 31-37.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lantu, M. S. Koleangan, A. M., & Rotinsulu, O. T. (2017). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di kota Bitung. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*. 19(2), 1-19.
- Lubis, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyanto, J. (2015). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(1), 58-63.
- Meilila, H. (2017). Analisis performa saham konvensional dan syariah saat krisis di Indonesia. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal. *JEJAK*, 4(2), 102–113.
- Mubarrizi, A. F. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah di provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. IAIN Tulungagung.

- Najmi, I. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana ZIS terhadap kemiskinan: Bukti empiris data panel di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 3(1), 25-33.
- Nursali, M. (2017). Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk analisis ekonometrika dasar: Aplikasi dan interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(4).
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh belanja pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia: Studi kasus provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74-91.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217-240.
- Sakirman. (2016). Urgensi masalah dalam konsep ekonomi syariah. *Journal of Social-Religi Research*, 1(1), 17-28.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. *Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.

- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 1-13.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3).
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183-191.
- Takhim, M. (2016). Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2).
- Tama, L. P. (2019). Pengaruh faktor-faktor penyebab kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi pada kota Bandar Lampung tahun 2013-2017). *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah.
- Wahyudi, R., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2014). Analisis belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 49-59.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah di kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Panel

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Variabel			
			PAD (Rp000)	Belanja Daerah (Rp000)	Kemiskinan (%)	Kemaslahatan Ekonomi (IPM) (%)
1	SIMEULU E	2014	657,61	568,64	19,92	62,18
		2015	751,61	705,53	20,43	63,16
		2016	874,34	856,67	19,93	63,82
		2017	989,79	1 011,87	20,2	64,41
		2018	948,28	847,99	19,78	64,74
		2019	980,84	980,84	18,99	65,7
2	ACEH SINGKIL	2014	634,63	603,37	17,77	65,27
		2015	850,41	842,63	21,72	66,05
		2016	900,96	967,11	21,6	66,96
		2017	861,8	898,38	22,11	67,37
		2018	756,52	742,72	21,25	68,02
		2019	916,81	916,81	20,78	68,91
3	ACEH SELATAN	2014	1 006,14	964,02	12,79	62,35
		2015	1 295,87	1 253,60	13,24	63,28
		2016	1 460,04	1 481,28	13,48	64,13
		2017	1 459,14	1 471,14	14,07	65,03
		2018	1 402,86	1 353,58	14,01	65,92
		2019	1 533,21	1 533,21	13,09	66,9
4	ACEH TENGGA RA	2014	861,07	868,71	13,75	65,9
		2015	1 214,01	1 224,56	14,91	66,77
		2016	1 447,88	1 434,31	14,46	67,48
		2017	1 378,58	1 432,00	14,86	68,09
		2018	1 198,42	1 183,21	14,29	68,67
		2019	1 302,58	1 302,58	13,43	69,36
5	ACEH TIMUR	2014	1 275,98	1 258,95	15,88	63,57
		2015	1 530,41	1 504,99	15,85	64,55
		2016	1 724,36	1 751,87	15,06	65,42
		2017	1 943,55	1 887,33	15,25	66,32
		2018	1 688,90	1 598,09	14,49	66,82
		2019	2 076,81	2 076,81	14,47	67,39

6	ACEH TENGAH	2014	1 040,23	1 075,70	16,99	70,96
		2015	1 366,21	1 319,89	17,51	71,51
		2016	1 530,98	1 608,91	16,64	72,04
		2017	1 500,75	1 497,20	16,84	72,19
		2018	1 290,00	1 239,07	15,58	72,64
		2019	1 084,49	1 084,49	15,5	73,14
7	ACEH BARAT	2014	973,17	906,66	22,97	67,31
		2015	1 096,52	1 123,32	21,46	68,41
		2016	1 295,09	1 329,71	20,38	69,26
		2017	1 350,73	1 408,31	20,28	70,2
		2018	1 304,18	1 216,37	19,31	70,47
		2019	1 448,67	1 448,67	18,79	71,22
8	ACEH BESAR	2014	1 170,21	1 161,83	16,13	71,06
		2015	1 519,86	1 432,06	15,93	71,7
		2016	1 770,74	1 812,09	15,55	71,75
		2017	1 768,18	1 912,33	15,41	72
		2018	1 872,05	1 727,23	14,47	72,73
		2019	1 782,70	1 782,70	13,92	73,55
9	PIDIE	2014	1 288,54	1 235,59	20,29	67,87
		2015	1 727,46	1 695,99	21,18	68,68
		2016	2 061,59	2 136,43	21,25	69,06
		2017	2 141,36	2 219,37	21,43	69,52
		2018	2 140,96	1 981,01	20,47	69,93
		2019	2 346,36	2 346,36	19,46	70,41
10	BIREUEN	2014	1 321,49	1 280,88	16,94	68,71
		2015	1 667,68	1 607,64	16,94	69,77
		2016	1 837,71	1 936,61	15,95	70,21
		2017	2 051,27	2 051,26	15,87	71,11
		2018	1 819,19	1 761,17	14,31	71,37
		2019	1 997,24	1 997,24	13,56	72,27
11	ACEH UTARA	2014	1 755,81	1 704,73	19,58	65,93
		2015	1 989,55	2 018,55	19,2	66,85
		2016	2 415,50	2 434,71	19,46	67,19
		2017	2 701,38	2 714,59	19,78	67,67
		2018	2 299,72	2 250,88	18,27	68,36
		2019	2 652,44	2 652,44	17,39	69,22
12	ACEH BARAT DAYA	2014	737,25	689,04	17,99	63,08
		2015	912,5	871,31	18,25	63,77
		2016	1 030,35	1 104,56	18,03	64,57
		2017	985,45	1 049,63	18,31	65,09
		2018	984,45	818	17,1	65,67
		2019	1 082,99	1 082,99	16,26	66,56

13	GAYO LUES	2014	734,2	670,41	21,43	63,34
		2015	950,02	908,88	21,95	63,67
		2016	1 065,54	1 070,56	21,86	64,26
		2017	975,21	974,21	21,97	65,01
		2018	922,64	873,24	20,7	65,88
		2019	1 024,05	1 024,05	19,87	66,87
14	ACEH TAMIANG	2014	925,34	897,49	14,58	66,09
		2015	1 115,34	1 159,08	14,57	67,03
		2016	1 326,98	1 288,83	14,51	67,41
		2017	1 241,18	1 276,18	14,69	67,99
		2018	1 181,32	1 126,29	14,21	68,45
		2019	1 385,63	1 385,63	13,38	69,23
15	NAGAN RAYA	2014	889,97	898,78	20,85	65,58
		2015	1 028,69	1 050,36	20,13	66,73
		2016	1 149,19	1 143,29	19,25	67,32
		2017	1 259,93	1 342,38	19,34	67,78
		2018	993,95	987,05	18,97	68,15
		2019	1 305,07	1 305,07	17,97	69,11
16	ACEH JAYA	2014	672,28	667,18	16,52	67,3
		2015	898,45	883,42	15,93	67,53
		2016	980,61	1 025,41	15,01	67,7
		2017	961,34	1 009,18	14,85	68,07
		2018	856,49	793,52	14,16	68,83
		2019	968,43	968,43	13,36	69,74
17	BENER MERIAH	2014	721,88	707,54	22,45	70
		2015	831,32	823,52	21,55	70,62
		2016	987,02	1 004,10	21,43	71,42
		2017	1 061,88	1 081,04	21,14	71,89
		2018	881,24	879,57	20,13	72,14
		2019	953,96	953,96	19,3	72,97
18	PIDIE JAYA	2014	678,88	664,29	21,78	69,89
		2015	896,42	878,97	21,4	70,49
		2016	1 002,52	993,06	21,18	71,13
		2017	960,34	979,92	21,82	71,73
		2018	1 277,58	1 197,18	20,17	71,12
		2019	988	988	19,31	72,87
19	BANDA ACEH	2014	1 134,10	1 096,15	7,78	82,22
		2015	1 217,56	1 189,39	7,72	83,25
		2016	1 321,58	1 331,58	7,41	83,73
		2017	1 247,69	1 248,39	7,44	83,95
		2018	1 217,62	1 188,10	7,25	84,37
		2019	1 328,26	1 328,26	7,22	85,07

20	SABANG	2014	525,21	521,44	17,02	71,5
		2015	550,6	604,57	17,69	72,51
		2016	639,48	612,51	17,33	73,36
		2017	655,13	670,13	17,66	74,1
		2018	693,93	599,24	16,31	74,82
		2019	726,51	726,51	15,6	75,77
21	LANGSA	2014	756,49	729,56	12,08	73,81
		2015	788,86	786,89	11,62	74,74
		2016	984,06	998,27	11,09	75,41
		2017	987,95	1 025,19	11,24	75,89
		2018	829,8	792,04	10,79	76,34
		2019	980,86	980,86	10,57	77,16
22	LHOKSEU MAWE	2014	768,27	727,48	11,93	74,44
		2015	835,81	879,07	12,16	75,11
		2016	908,88	890,33	11,98	75,78
		2017	882,06	905,82	12,32	76,34
		2018	804,74	777,78	11,81	76,62
		2019	940,88	940,88	11,18	77,3
23	SUBULUS SALAM	2014	486,16	434,11	19,72	60,39
		2015	656,89	554,84	20,39	61,32
		2016	821,57	848,5	19,57	62,18
		2017	733,6	738,1	19,71	62,88
		2018	565,74	562,25	18,51	63,48
		2019	730,64	730,64	17,95	64,46

Lampiran 2 : Hasil Output Eviews

2.1 Uji Stasioneritas data

1) PAD

Phillips-Perron (PP)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: PAD

Date: 07/10/21 Time: 00:15

Sample: 2014 2019

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 115

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	145.560	0.0000
PP - Choi Z-stat	-7.35360	0.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an

asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results PAD

Cross section	Prob.	Bandwidth	Obs
1	0.0502	4.0	5
2	0.0035	4.0	5
3	0.0025	4.0	5
4	0.0117	4.0	5
5	0.5190	4.0	5
6	0.4024	1.0	5
7	0.2460	4.0	5
8	0.0033	2.0	5
9	0.0042	4.0	5
10	0.0128	4.0	5
11	0.2462	4.0	5
12	0.0208	4.0	5
13	0.0034	4.0	5
14	0.1232	4.0	5
15	0.1918	4.0	5
16	0.0017	4.0	5
17	0.0592	4.0	5
18	0.1409	2.0	5
19	0.1042	4.0	5
20	0.6894	4.0	5
21	0.2282	4.0	5
22	0.1275	4.0	5
23	0.0452	4.0	5

2) BD

Phillips-Perron (PP)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: BD

Date: 07/10/21 Time: 00:27

Sample: 2014 2019

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 115

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	136.197	0.0000
PP - Choi Z-stat	-7.29091	0.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results BD

Cross section	Prob.	Bandwidth	Obs
1	0.1357	4.0	5
2	0.0117	4.0	5
3	0.0090	4.0	5
4	0.0151	4.0	5
5	0.5562	4.0	5
6	0.4772	1.0	5
7	0.0918	4.0	5
8	0.0231	4.0	5
9	0.0360	4.0	5
10	0.0233	4.0	5
11	0.1498	4.0	5
12	0.0457	4.0	5
13	0.0070	4.0	5
14	0.0440	4.0	5
15	0.0927	4.0	5
16	0.0186	4.0	5
17	0.0682	4.0	5
18	0.0849	2.0	5
19	0.0934	4.0	5
20	0.3915	0.0	5
21	0.1321	4.0	5
22	0.0039	4.0	5
23	0.0659	4.0	5

3) KMS

Phillips-Perron (PP)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: KMS

Date: 07/10/21 Time: 00:28

Sample: 2014 2019

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 115

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	30.6078	0.9606
PP - Choi Z-stat	4.58724	1.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results KMS

Cross section	Prob.	Bandwidth	Obs
1	0.8245	0.0	5
2	0.0013	4.0	5
3	0.2800	4.0	5
4	0.3466	1.0	5
5	0.8295	1.0	5
6	0.8816	1.0	5
7	0.0367	4.0	5
8	0.9962	2.0	5
9	0.7889	0.0	5
10	0.9922	1.0	5
11	0.9839	4.0	5
12	0.9439	0.0	5
13	0.9315	0.0	5
14	0.9951	2.0	5
15	0.9009	4.0	5
16	0.9601	4.0	5
17	0.9872	4.0	5
18	0.9800	4.0	5
19	0.6712	1.0	5
20	0.8695	0.0	5
21	0.3274	4.0	5
22	0.8171	1.0	5
23	0.9538	1.0	5

Orde 1 (First Differences)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(KMS)

Date: 07/10/21 Time: 00:28

Sample: 2014 2019

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 92

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	88.4213	0.0002
PP - Choi Z-stat	-3.52940	0.0002

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results D(KMS)

Cross

section	Prob.	Bandwidth	Obs
1	0.2349	0.0	4
2	0.0066	2.0	4
3	0.9255	0.0	4
4	0.1854	0.0	4
5	0.0006	1.0	4
6	0.0140	0.0	4
7	0.0926	3.0	4
8	0.3453	0.0	4
9	0.6271	3.0	4
10	0.0854	0.0	4
11	0.5558	0.0	4
12	0.4971	1.0	4
13	0.5198	2.0	4
14	0.8574	0.0	4
15	0.4689	1.0	4
16	0.0982	2.0	4
17	0.4201	0.0	4
18	0.3713	0.0	4
19	0.0347	0.0	4
20	0.2706	1.0	4
21	0.0648	3.0	4
22	0.5447	0.0	4
23	0.0557	0.0	4

4) IPM

Phillips-Perron (PP)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: IPM

Date: 07/10/21 Time: 00:30

Sample: 2014 2019

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 115

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	42.0530	0.6383
PP - Choi Z-stat	3.25141	0.9994

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results IPM

Cross

section	Prob.	Bandwidth	Obs
1	0.6695	4.0	5
2	0.8882	4.0	5
3	0.9863	1.0	5
4	0.0608	4.0	5
5	0.0016	4.0	5
6	0.7407	4.0	5
7	0.0310	3.0	5
8	0.9974	4.0	5
9	0.0938	4.0	5
10	0.6887	2.0	5
11	0.9637	4.0	5
12	0.9736	4.0	5
13	1.0000	4.0	5
14	0.7846	2.0	5
15	0.5274	4.0	5
16	1.0000	4.0	5
17	0.8375	4.0	5
18	0.9337	3.0	5
19	0.3409	4.0	5
20	0.5873	4.0	5
21	0.4899	4.0	5
22	0.3830	4.0	5
23	0.7739	4.0	5

Orde 1 (First Differences)

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)

Series: D(IPM)

Date: 07/10/21 Time: 00:31

Sample: 2014 2019

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

Total (balanced) observations: 92

Cross-sections included: 23

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	92.9404	0.0001
PP - Choi Z-stat	-3.78001	0.0001

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results D(IPM)

Cross section	Prob.	Bandwidth	Obs
---------------	-------	-----------	-----

1	0.1079	3.0	4
2	0.3609	2.0	4
3	0.4194	0.0	4
4	0.1241	1.0	4
5	0.7381	2.0	4
6	0.1888	3.0	4
7	0.3038	1.0	4
8	0.6232	0.0	4
9	0.0000	3.0	4
10	0.0085	0.0	4
11	0.2949	0.0	4
12	0.6066	2.0	4
13	0.0162	1.0	4
14	0.0253	1.0	4
15	0.1275	2.0	4
16	0.9166	0.0	4
17	0.3830	1.0	4
18	0.0766	1.0	4
19	0.1819	0.0	4
20	0.3136	1.0	4
21	0.3123	1.0	4
22	0.3574	1.0	4
23	0.4402	2.0	4

2.2 Penentuan Panjang Lag
d(pad) d(bd) d(kms) d(ipm)

Vector Autoregression Estimates
Date: 07/10/21 Time: 00:37
Sample (adjusted): 2017 2019
Included observations: 69 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []

	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
D(PAD(-1))	-0.521069 (0.32041) [-1.62627]	0.267497 (0.35006) [0.76415]	-0.000723 (0.00105) [-0.68682]	0.000204 (0.00059) [0.34490]
D(PAD(-2))	-0.051794 (0.40316) [-0.12847]	0.421244 (0.44047) [0.95635]	0.000543 (0.00132) [0.41022]	-0.001263 (0.00074) [-1.69541]
D(BD(-1))	0.067821 (0.27774) [0.24419]	-0.612613 (0.30344) [-2.01887]	0.001954 (0.00091) [2.14252]	-0.000257 (0.00051) [-0.50127]
D(BD(-2))	0.136669	-0.381167	-0.000838	0.000954

	(0.36802) [0.37137]	(0.40207) [-0.94800]	(0.00121) [-0.69317]	(0.00068) [1.40342]
D(KMS(-1))	-78.54249 (36.9360) [-2.12645]	-115.6842 (40.3542) [-2.86672]	-0.207899 (0.12130) [-1.71387]	-0.230487 (0.06824) [-3.37780]
D(KMS(-2))	15.67337 (25.4687) [0.61540]	32.91059 (27.8256) [1.18274]	0.222596 (0.08364) [2.66126]	0.062944 (0.04705) [1.33778]
D(IPM(-1))	11.07433 (72.7865) [0.15215]	-7.041185 (79.5224) [-0.08854]	0.222232 (0.23904) [0.92968]	-0.101827 (0.13447) [-0.75727]
D(IPM(-2))	160.8212 (76.6329) [2.09859]	225.1917 (83.7247) [2.68967]	0.296877 (0.25167) [1.17961]	0.092566 (0.14157) [0.65384]
C	-125.4910 (65.6412) [-1.91177]	-177.0921 (71.7158) [-2.46936]	-0.799028 (0.21558) [-3.70648]	0.561209 (0.12127) [4.62792]
R-squared	0.286990	0.442315	0.398755	0.327137
Adj. R-squared	0.191922	0.367957	0.318589	0.237422
Sum sq. resids	1232045.	1470628.	13.28842	4.204852
S.E. equation	143.2972	156.5582	0.470610	0.264728
F-statistic	3.018789	5.948443	4.974109	3.646394
Log likelihood	-435.6645	-441.7715	-41.07790	-1.380331
Akaike AIC	12.88883	13.06584	1.451533	0.300879
Schwarz SC	13.18023	13.35725	1.742939	0.592284
Mean dependent	14.49942	6.909130	-0.450145	0.631739
S.D. dependent	159.4083	196.9257	0.570107	0.303150
Determinant resid covariance (dof adj.)	681859.1			
Determinant resid covariance	389855.2			
Log likelihood	-835.7638			
Akaike information criterion	25.26852			
Schwarz criterion	26.43414			
Number of coefficients	36			

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: D(PAD) D(BD) D(KMS) D(IPM)

Exogenous variables: C

Date: 07/10/21 Time: 00:42

Sample: 1 138

Included observations: 129

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
-----	------	----	-----	-----	----	----

0	-2219.268	NA	1.10e+10	34.46927	34.55795*	34.50531
1	-2182.877	69.96226	7.99e+09	34.15312	34.59651	34.33328
2	-2151.483	58.40682	6.30e+09	33.91446	34.71255	34.23874
3	-2123.070	51.09993	5.21e+09	33.72201	34.87480	34.19041
4	-2110.317	22.14345	5.49e+09	33.77236	35.27986	34.38489
5	-2077.679	54.65042	4.27e+09	33.51440	35.37660	34.27105
6	-2036.475	66.43653	2.91e+09	33.12365	35.34056	34.02443*
7	-2017.862	28.85758*	2.83e+09*	33.08314*	35.65475	34.12804
8	-2011.463	9.524446	3.33e+09	33.23199	36.15831	34.42101

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

2.3 Uji Kointegrasi Metode Johansen Fisher

Date: 07/10/21 Time: 00:50
Sample: 1 138
Included observations: 134
Series: D(PAD) D(BD) D(KMS) D(IPM)
Lags interval: 1 to 2

Selected
(0.05 level*)
Number of
Cointegrating
Relations by
Model

Data Trend:	None	None	Linear	Linear	Quadratic
Test Type	No Intercept	Intercept	Intercept	Intercept	Intercept
	No Trend	No Trend	No Trend	Trend	Trend
Trace	4	4	4	4	4
Max-Eig	4	4	4	4	4

*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)

Information
Criteria by
Rank and
Model

Data Trend:	None	None	Linear	Linear	Quadratic
Rank or	No Intercept	Intercept	Intercept	Intercept	Intercept

No. of CEs	No Trend	No Trend	No Trend	Trend	Trend
Log Likelihood by Rank (rows) and Model (columns)					
0	-2353.318	-2353.318	-2353.310	-2353.310	-2353.286
1	-2280.106	-2280.095	-2280.094	-2280.062	-2280.047
2	-2242.789	-2242.754	-2242.754	-2242.139	-2242.131
3	-2219.613	-2219.578	-2219.578	-2218.896	-2218.892
4	-2200.121	-2200.083	-2200.083	-2199.395	-2199.395

Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)					
0	35.60176	35.60176	35.66134	35.66134	35.72069
1	34.62844	34.64322	34.68797	34.70243	34.74697
2	34.19088	34.22021	34.25006	34.27073	34.30047
3	33.96438	34.00862	34.02355	34.05815	34.07302
4	33.79285*	33.85198	33.85198	33.90141	33.90141

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns)					
0	36.29378	36.29378	36.43986	36.43986	36.58571
1	35.49347	35.52987	35.63950	35.67558	35.78500
2	35.22891	35.30149	35.37459	35.43852	35.51150
3	35.17541*	35.28454	35.32109	35.42056	35.45706
4	35.17689	35.32253	35.32253	35.45846	35.45846

Date: 07/10/21 Time: 00:52

Sample (adjusted): 9 138

Included observations: 130 after adjustments

Trend assumption: No deterministic trend

Series: D(PAD) D(BD) D(KMS) D(IPM)

Lags interval (in first differences): 1 to 6

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
------------------------------	------------	--------------------	------------------------	---------

None *	0.468953	178.7744	40.17493	0.0001
At most 1 *	0.298661	96.49672	24.27596	0.0000
At most 2 *	0.190089	50.37738	12.32090	0.0000
At most 3 *	0.161958	22.96932	4.129906	0.0000

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.468953	82.27764	24.15921	0.0000
At most 1 *	0.298661	46.11934	17.79730	0.0000
At most 2 *	0.190089	27.40806	11.22480	0.0000
At most 3 *	0.161958	22.96932	4.129906	0.0000

Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'S11*b=I):

D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
0.209508	-0.210202	-0.380508	0.187046
0.048954	-0.041178	1.101260	-0.518015
-0.074724	0.085038	-1.060552	-1.439177
0.039884	-0.028624	0.790872	1.274623

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(PAD,2)	17.59273	-13.75284	-76.29475	-69.29648
D(BD,2)	45.64404	-9.730598	-78.60017	-65.07568
D(KMS,2)	0.376964	-1.027794	0.469864	0.104907
D(IPM,2)	0.475494	0.898328	0.142093	-0.594333

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2083.480

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1.000000	-1.003314	-1.816201	0.892788
	(0.00850)	(0.85464)	(0.91997)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD,2)	3.685814
	(5.06031)

D(BD,2)	9.562783 (5.06317)
D(KMS,2)	0.078977 (0.04538)
D(IPM,2)	0.099620 (0.04683)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2060.421

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1.000000	0.000000	148.6156 (31.9735)	-70.10600 (35.0691)
0.000000	1.000000	149.9349 (31.9900)	-70.76424 (35.0872)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD,2)	3.012559 (5.18859)	-3.131713 (5.16560)
D(BD,2)	9.086433 (5.19554)	-9.193790 (5.17251)
D(KMS,2)	0.028663 (0.04131)	-0.036916 (0.04113)
D(IPM,2)	0.143596 (0.04423)	-0.136942 (0.04404)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2046.717

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1.000000	0.000000	0.000000	-106.3663 (21.3293)
0.000000	1.000000	0.000000	-107.3464 (21.2605)
0.000000	0.000000	1.000000	0.243987 (0.16050)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD,2)	8.713611 (5.22428)	-9.619674 (5.28628)	59.07492 (36.1396)
D(BD,2)	14.95975 (5.21513)	-15.87780 (5.27701)	55.27573 (36.0762)
D(KMS,2)	-0.006448 (0.04247)	0.003040 (0.04297)	-1.773622 (0.29376)
D(IPM,2)	0.132979 (0.04672)	-0.124858 (0.04727)	0.657667 (0.32319)

2.4 Uji Stabilitas Panel VAR

Roots of Characteristic Polynomial
 Endogenous variables: D(PAD) D(BD)
 D(KMS) D(IPM)
 Exogenous variables: C
 Lag specification: 1 2
 Date: 07/10/21 Time: 00:46

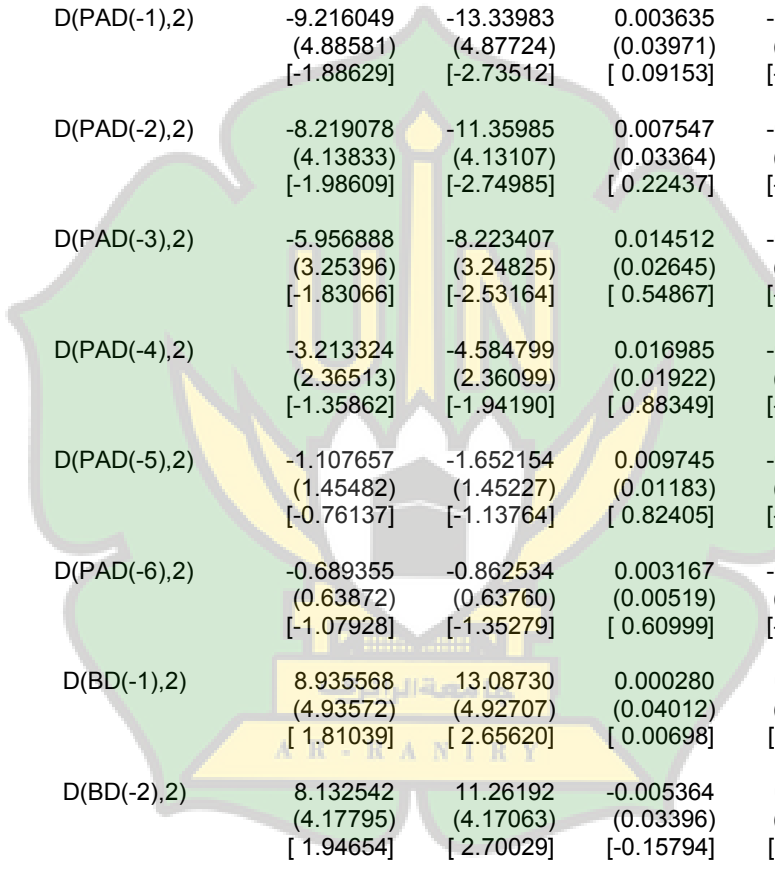
Root	Modulus
-0.513192 - 0.539697i	0.744741
-0.513192 + 0.539697i	0.744741
0.173847 - 0.438721i	0.471909
0.173847 + 0.438721i	0.471909
-0.161817 - 0.256114i	0.302950
-0.161817 + 0.256114i	0.302950
-0.230751	0.230751
0.172644	0.172644

No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

2.5 Uji Panel Vector Error Correction Model Hubungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

Vector Error Correction Estimates
 Date: 07/10/21 Time: 00:56
 Sample (adjusted): 9 138
 Included observations: 130 after adjustments
 Standard errors in () & t-statistics in []

Cointegrating Eq:	CointEq1	CointEq2	CointEq3	
D(PAD(-1))	1.000000	0.000000	0.000000	
D(BD(-1))	0.000000	1.000000	0.000000	
D(KMS(-1))	0.000000	0.000000	1.000000	
D(IPM(-1))	-106.3663 (21.5354) [-4.93914]	-107.3464 (21.4659) [-5.00078]	0.243987 (0.16205) [1.50559]	
Error Correction:	D(PAD,2)	D(BD,2)	D(KMS,2)	D(IPM,2)
CointEq1	8.713611 (5.27476) [1.65194]	14.95975 (5.26552) [2.84108]	-0.006448 (0.04288) [-0.15038]	0.132979 (0.04717) [2.81909]

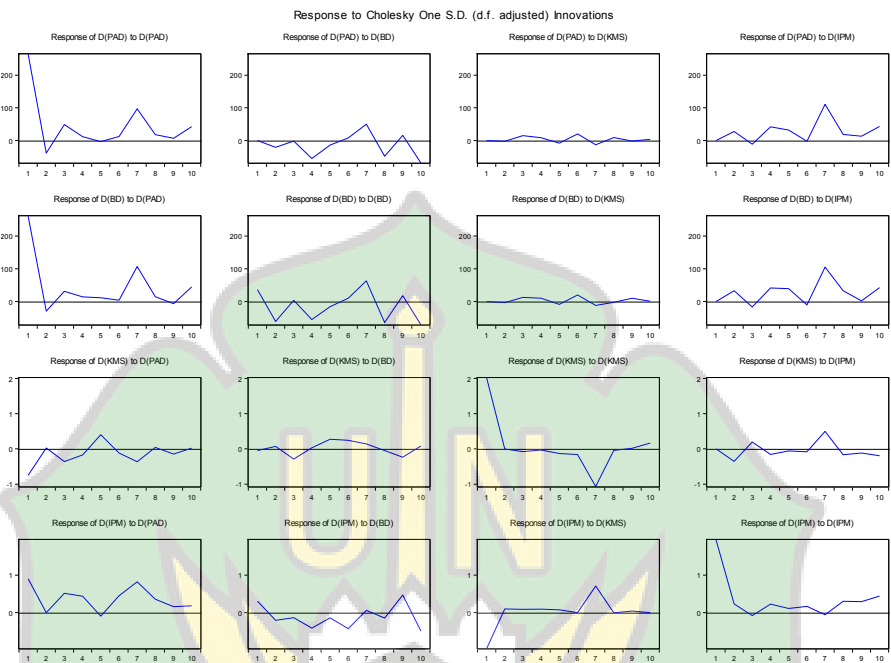


CointEq2	-9.619674 (5.33735) [-1.80233]	-15.87780 (5.32800) [-2.98007]	0.003040 (0.04338) [0.07008]	-0.124858 (0.04773) [-2.61590]
CointEq3	59.07492 (36.4887) [1.61899]	55.27573 (36.4248) [1.51753]	-1.773622 (0.29660) [-5.97992]	0.657667 (0.32631) [2.01547]
D(PAD(-1),2)	-9.216049 (4.88581) [-1.88629]	-13.33983 (4.87724) [-2.73512]	0.003635 (0.03971) [0.09153]	-0.126663 (0.04369) [-2.89897]
D(PAD(-2),2)	-8.219078 (4.13833) [-1.98609]	-11.35985 (4.13107) [-2.74985]	0.007547 (0.03364) [0.22437]	-0.114344 (0.03701) [-3.08972]
D(PAD(-3),2)	-5.956888 (3.25396) [-1.83066]	-8.223407 (3.24825) [-2.53164]	0.014512 (0.02645) [0.54867]	-0.093113 (0.02910) [-3.19985]
D(PAD(-4),2)	-3.213324 (2.36513) [-1.35862]	-4.584799 (2.36099) [-1.94190]	0.016985 (0.01922) [0.88349]	-0.072453 (0.02115) [-3.42554]
D(PAD(-5),2)	-1.107657 (1.45482) [-0.76137]	-1.652154 (1.45227) [-1.13764]	0.009745 (0.01183) [0.82405]	-0.042823 (0.01301) [-3.29152]
D(PAD(-6),2)	-0.689355 (0.63872) [-1.07928]	-0.862534 (0.63760) [-1.35279]	0.003167 (0.00519) [0.60999]	-0.019429 (0.00571) [-3.40152]
D(BD(-1),2)	8.935568 (4.93572) [1.81039]	13.08730 (4.92707) [2.65620]	0.000280 (0.04012) [0.00698]	0.118362 (0.04414) [2.68158]
D(BD(-2),2)	8.132542 (4.17795) [1.94654]	11.26192 (4.17063) [2.70029]	-0.005364 (0.03396) [-0.15794]	0.108202 (0.03736) [2.89603]
D(BD(-3),2)	5.888086 (3.28938) [1.79003]	8.092919 (3.28362) [2.46464]	-0.012753 (0.02674) [-0.47698]	0.088502 (0.02942) [3.00863]
D(BD(-4),2)	3.030188 (2.38642) [1.26977]	4.351577 (2.38223) [1.82668]	-0.013652 (0.01940) [-0.70379]	0.066980 (0.02134) [3.13856]
D(BD(-5),2)	0.912533	1.426367	-0.007056	0.037749

	(1.45713) [0.62625]	(1.45458) [0.98061]	(0.01184) [-0.59572]	(0.01303) [2.89695]
D(BD(-6),2)	0.616295 (0.62968) [0.97874]	0.799708 (0.62858) [1.27225]	-0.003995 (0.00512) [-0.78061]	0.018501 (0.00563) [3.28547]
D(KMS(-1),2)	-53.38038 (31.1581) [-1.71321]	-48.67676 (31.1035) [-1.56499]	0.684962 (0.25327) [2.70451]	-0.552398 (0.27864) [-1.98249]
D(KMS(-2),2)	-48.24628 (27.7418) [-1.73912]	-44.81670 (27.6932) [-1.61833]	0.699173 (0.22550) [3.10058]	-0.524460 (0.24809) [-2.11401]
D(KMS(-3),2)	-34.67672 (24.5826) [-1.41062]	-31.52698 (24.5395) [-1.28474]	0.659125 (0.19982) [3.29863]	-0.436420 (0.21984) [-1.98521]
D(KMS(-4),2)	-30.09016 (21.6253) [-1.39143]	-25.33400 (21.5874) [-1.17356]	0.585856 (0.17578) [3.33290]	-0.391708 (0.19339) [-2.02549]
D(KMS(-5),2)	-24.65601 (17.9826) [-1.37110]	-19.60059 (17.9511) [-1.09189]	0.479958 (0.14617) [3.28354]	-0.383033 (0.16081) [-2.38184]
D(KMS(-6),2)	-4.919714 (12.7762) [-0.38507]	-0.509241 (12.7538) [-0.03993]	0.085260 (0.10385) [0.82099]	-0.067122 (0.11425) [-0.58748]
D(IPM(-1),2)	-105.9127 (32.9706) [-3.21234]	-109.7239 (32.9128) [-3.33378]	-0.110657 (0.26800) [-0.41290]	-0.298751 (0.29485) [-1.01324]
D(IPM(-2),2)	-107.9249 (30.5524) [-3.53246]	-111.8011 (30.4988) [-3.66575]	-0.020217 (0.24834) [-0.08141]	-0.314740 (0.27322) [-1.15196]
D(IPM(-3),2)	-88.75744 (27.1733) [-3.26635]	-92.40222 (27.1257) [-3.40645]	-0.057601 (0.22088) [-0.26078]	-0.216529 (0.24300) [-0.89105]
D(IPM(-4),2)	-65.35413 (23.8102) [-2.74479]	-65.24435 (23.7685) [-2.74499]	-0.084290 (0.19354) [-0.43552]	-0.143747 (0.21293) [-0.67510]
D(IPM(-5),2)	-63.91291 (20.5163) [-3.11522]	-63.72126 (20.4804) [-3.11133]	-0.164533 (0.16677) [-0.98661]	-0.052650 (0.18347) [-0.28696]

D(IPM(-6),2)	-13.13116 (16.5907) [-0.79148]	-14.83548 (16.5616) [-0.89577]	0.169072 (0.13486) [1.25372]	-0.144662 (0.14837) [-0.97503]
R-squared	0.776226	0.809680	0.705319	0.706664
Adj. R-squared	0.719740	0.761638	0.630933	0.632618
Sum sq. resids	7181889.	7156739.	474.5179	574.3542
S.E. equation	264.0588	263.5961	2.146385	2.361409
F-statistic	13.74179	16.85360	9.481938	9.543570
Log likelihood	-894.2320	-894.0040	-268.6217	-281.0333
Akaike AIC	14.17280	14.16929	4.548027	4.738974
Schwarz SC	14.76837	14.76486	5.143591	5.334538
Mean dependent	-0.391385	-0.545154	-0.034692	0.001538
S.D. dependent	498.7927	539.9089	3.533095	3.895939
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.41E+09		
Determinant resid covariance		5.56E+08		
Log likelihood		-2046.717		
Akaike information criterion		33.33410		
Schwarz criterion		35.98106		
Number of coefficients		120		

2.6 Hasil Analisis Impulse Response Function (IRF)



2.7 Hasil Analisis Varian Decomposition (VD)

Variance Decomposition of D(PAD):						
Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)	
1	264.0588	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	
2	269.1195	98.33019	0.600571	0.006594	1.062649	
3	274.1636	97.93652	0.582650	0.286639	1.194191	
4	283.1333	92.00034	4.362404	0.350017	3.287237	
5	285.3625	90.58359	4.528817	0.423924	4.463667	
6	286.4363	90.09054	4.565433	0.908225	4.435800	
7	326.1135	78.33696	5.868894	0.854487	14.93966	
8	330.7690	76.43487	7.831355	0.904868	14.82891	
9	331.4881	76.14453	8.026036	0.903320	14.92612	
10	343.8087	72.31110	11.39741	0.848848	15.44264	

Variance Decomposition of D(BD):

Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	263.5961	98.08440	1.915599	0.000000	0.000000
2	274.0232	91.90678	6.638606	0.011293	1.443321
3	276.6771	91.46580	6.532759	0.233228	1.768210
4	285.6426	86.07398	9.798434	0.344835	3.782750
5	289.1440	84.17279	9.846729	0.422834	5.557650
6	290.2370	83.56539	9.892606	0.905885	5.636115
7	333.1470	73.74350	11.12394	0.806390	14.32617
8	341.1490	70.52040	14.10461	0.772979	14.60201
9	341.8462	70.26502	14.32771	0.860637	14.54664
10	354.4928	66.95597	17.26031	0.801618	14.98210

Variance Decomposition of
D(KMS):

Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	2.146385	12.21119	0.050722	87.73809	0.000000
2	2.177076	11.88232	0.150105	85.28196	2.685610
3	2.235588	13.87183	1.817230	81.00023	3.310703
4	2.248470	14.31103	1.815718	80.09896	3.774285
5	2.304462	16.64903	3.108134	76.58312	3.659717
6	2.327697	16.58340	4.146071	75.54944	3.721086
7	2.638043	14.81612	3.500710	75.24131	6.441859
8	2.644387	14.76909	3.516260	74.91028	6.804371
9	2.661455	14.87761	4.255935	73.95623	6.910231
10	2.674859	14.73391	4.300495	73.58373	7.381868

Variance Decomposition of
D(IPM):

Period	S.E.	D(PAD)	D(BD)	D(KMS)	D(IPM)
1	2.361409	14.56793	1.679787	16.29346	67.45882
2	2.383750	14.29617	2.389952	16.15483	67.15904
3	2.445238	18.02088	2.568642	15.48177	63.92870
4	2.530352	19.80118	5.074820	14.59477	60.52923
5	2.539495	19.79502	5.339485	14.57981	60.28569
6	2.620308	21.58503	7.685674	13.69440	57.03489
7	2.838894	26.82038	6.591817	17.95836	48.62944
8	2.881163	27.59120	6.645345	17.43536	48.32809
9	2.938368	26.82017	8.928394	16.78511	47.46633
10	3.016740	25.81386	11.08730	15.92432	47.17452

Cholesky Ordering: D(PAD) D(BD) D(KMS) D(IPM)

2.8 Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 07/10/21 Time: 09:25

Sample: 1 138

Lags: 7

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
BD does not Granger Cause PAD	131	3.65882	0.0013
PAD does not Granger Cause BD		3.47792	0.0020
KMS does not Granger Cause PAD	131	0.93807	0.4801
PAD does not Granger Cause KMS		4.10672	0.0005
IPM does not Granger Cause PAD	131	2.18093	0.0408
PAD does not Granger Cause IPM		4.76694	0.0001
KMS does not Granger Cause BD	131	0.82905	0.5652
BD does not Granger Cause KMS		4.12610	0.0004
IPM does not Granger Cause BD	131	1.83950	0.0861
BD does not Granger Cause IPM		5.59918	1.E-05
IPM does not Granger Cause KMS	131	0.67150	0.6958
KMS does not Granger Cause IPM		1.25261	0.2801